

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN TAHUN 2007

<http://www.bps.go.id>

**WACANA PEMBENTUKAN DAERAH
PEMERINTAHAN BARU**

...

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN TAHUN 2007

WACANA PEMBENTUKAN DAERAH PEMERINTAHAN BARU

ISBN:

Nomor Publikasi:

Katalog BPS:

Ukuran Buku: 16 x 24 Cm

Jumlah Halaman: 82 + x

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik. Statistik Politik dan Keamanan 2007: Studi Wacana Pembentukan Daerah Pemerintahan Baru.

Studi ini memfokuskan pembahasan mengenai pemekaran daerah provinsi yang terjadi setelah ditetapkannya perubahan kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 sampai akhir tahun 2006. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran pemerintahan daerah provinsi; mengetahui dampak pemekaran pemerintahan daerah provinsi terhadap kesejahteraan masyarakat; mengetahui persepsi masyarakat setelah terjadi pemekaran pemerintahan daerah provinsi.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo mewakili wilayah bagian timur Indonesia. Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau untuk mewakili wilayah bagian barat Indonesia. Sebagai pembanding dipilih Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Madura.

Studi ini menggunakan dua jenis data, data survei dan data sekunder. Data survei merupakan sumber data mengenai persepsi masyarakat setelah pemekaran wilayah. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber untuk melakukan studi komparasi antar waktu, yaitu sebelum dan sesudah pemekaran.

Sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde lama dan orde baru dianggap telah melahirkan ketimpangan antara pembangunan pusat dan daerah, terutama daerah yang jauh dari jangkauan pusat. Kondisi ini melahirkan semangat desentralisasi di era reformasi sehingga terbentuk tujuh provinsi baru yang memisahkan diri dari provinsi induknya yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.

Berdasarkan data yang ada, pembangunan perekonomian yang ditunjukkan PDRB memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan di semua provinsi baru. Pembangunan sosial dilihat dari pembangunan bidang pendidikan menunjukkan adanya peningkatan tingkat melek huruf di semua wilayah provinsi, meningkatnya jumlah anak yang

bersekolah, dan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk. Di bidang kesehatan, tercermin dari meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Pembangunan sarana dan prasarana ditunjukkan dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah PNS.

Berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat (setiap provinsi 200 responden), sekitar 92,5 persen masyarakat di provinsi penelitian berpendapat bahwa pemekaran daerah mutlak diperlukan. Sebagian besar (62,2 persen) beralasan karena merasa kurang adanya kegiatan pembangunan. Setelah pembentukan provinsi baru, sekitar 66,0 persen masyarakat menyatakan pelayanan pemerintah secara umum kepada masyarakat, lebih baik. Sekitar 69,7 persen masyarakat merasa bahwa kemudahan memperoleh bahan makanan (pokok) lebih baik. Sekitar tiga dari empat masyarakat menyatakan kondisi kemudahan memperoleh bahan pakaian/pakaian jadi, lebih baik dibanding sebelum pemekaran. Demikian pula mengenai kondisi fasilitas fisik bangunan pasar, sekitar 90,7 persen masyarakat menyatakan kondisinya lebih baik dibanding sebelum pemekaran. Kinerja pemerintah hasil pemekaran dalam pengelolaan potensi daerah dan sarana sosial budaya dinilai masyarakat lebih baik dibandingkan sebelum pemekaran. Sekitar 62,9 persen masyarakat merasakan kondisi keamanan lingkungan saat ini lebih baik dibanding sebelum mengalami pemekaran. Secara umum, sebanyak 65,4 persen masyarakat menilai bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat lebih baik dibandingkan sebelum mengalami pemekaran.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas kehendak-Nya Statistik Politik dan Keamanan 2007 dapat diselesaikan. Statistik Politik dan Keamanan merupakan publikasi tahunan dari Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik. Pada publikasi kali ini, Statistik Politik dan Keamanan memfokuskan pembahasan pada Studi Pembentukan Daerah Pemerintahan atau Pemekaran Daerah.

Seperti diketahui semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyangkut pemerintahan daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam perjalanan pelaksanaan perundangan tersebut terdapat suatu fenomena adanya keinginan sebagian daerah untuk memisahkan diri dari provinsi induknya untuk membentuk pemerintahan provinsi baru. Pemekaran wilayah yang terjadi pada periode ini diawali dengan terbentuknya Provinsi Banten yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian menyusul provinsi-provinsi lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan agar pembentukan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2007, mengulas mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran pemerintahan daerah provinsi, dampak pemekaran pemerintahan daerah provinsi terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi, serta membahas persepsi masyarakat setelah terjadi pemekaran daerah provinsi.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2008
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

<http://www.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar.....	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
Bab 2 Metodologi.....	5
2.1. Pemilihan Daerah Studi.....	5
2.2. Sumber dan Cakupan Data	6
2.3. Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden.....	6
Bab 3 Pemekaran Wilayah di Indonesia	7
3.1. Sejarah Perundang-undangan Pemekaran Daerah	7
3.2. Perkembangan Wilayah di Awal Kemerdekaan hingga Orde Baru	12
3.3. Perkembangan Wilayah di Era Reformasi.....	16
Bab 4 Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi	19
4.1. Perkembangan Indikator Ekonomi	20
4.2. Perkembangan Indikator Sosial.....	28
Bab 5 Pendapat Masyarakat Wilayah Pemekaran	35
5.1. Faktor-faktor yang Mendorong Pemekaran Wilayah	35
5.2. Pendapat Masyarakat tentang Pelayanan Masyarakat	38
5.3. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Pembangunan Perekonomian	40
5.4. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Pengelolaan Potensi Daerah dan Sarana Sosial Budaya	41
5.5. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Keamanan	43

4.6. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Kesejahteraan	
Masyarakat	45
Bab 6 Penutup	47
6.1. Kesimpulan.....	47
6.1. Saran	49
 Daftar Pustaka	51
Lampiran	57
Tabel-tabel lampiran.....	57

<http://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Sebaran Jumlah Provinsi di Akhir Masa Pemerintahan Orde Lama, menurut Pulau	15
Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Provinsi di Indonesia Tahun 1945 -2004	17
Gambar 4.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	21
Gambar 4.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.....	22
Gambar 4.3 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat dan Banten	22
Gambar 4.4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.....	23
Gambar 4.5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	23
Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, di Empat Provinsi Pemekaran	24
Gambar 4.7 Perkembangan PDRB per Kapita (Tanpa Migas) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, di Lima Provinsi Pemekaran.....	25
Gambar 4.8 Paritas Daya Beli di Tiga Provinsi Hasil Pemekaran Tahun 2002 dan 2006.....	26
Gambar 4.9 Paritas Daya Beli di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006	26
Gambar 4.10 Paritas Daya Beli di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2002 dan 2006	26
Gambar 4.11 Indeks Pembangunan Manusia di Tiga Provinsi Hasil Pemekaran Tahun 2002 dan 2006	27
Gambar 4.12 Indeks Pembangunan Manusia di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006	28
Gambar 4.13 Indeks Pembangunan Manusia di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2002 dan 2006.....	28

Gambar 4.14	Angka Melek Huruf di Tiga Provinsi Pemekaran Tahun 2002 dan 2006 ..	29
Gambar 4.15	Angka Melek Huruf di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006	29
Gambar 4.16	Angka Melek Huruf di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2002 dan 2006	29
Gambar 4.17	Rata-Rata Lama Sekolah di Tiga Provinsi Hasil Pemekaran Tahun 2002 dan 2006.....	30
Gambar 4.18	Rata-Rata Lama Sekolah di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006	30
Gambar 4.19	Rata-Rata Lama Sekolah di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2002 dan 2006	30
Gambar 4.20	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih di Tiga Provinsi Pemekaran, Tahun 2001 dan 2006	31
Gambar 4.21	Persentase Rumah Tangga yang tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Tiga Provinsi Pemekaran, Tahun 2002 dan 2006	32
Gambar 4.22	Perkembangan Pegawai Negeri Sipil di Lima Provinsi Pemekaran Pada Tahun Awal Terbentuk Wilayah dan Tahun 2006	32
Gambar 4.23	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (PLN dan Non PLN) di Tiga Provinsi Pemekaran, Tahun 2002 dan 2006.....	33
Gambar 5.1	Pendapat Masyarakat Provinsi Pemekaran Tentang Pemekaran Wilayah	37
Gambar 5.2	Alasan Masyarakat Provinsi Pemekaran yang Menyetujui Pemekaran Wilayah	37
Gambar 5.3	Pendapat Masyarakat Mengenai Pelayanan Provinsi Pemekaran.....	39
Gambar 5.4	Pendapat Masyarakat Mengenai Kemudahan Memperoleh Bahan Makanan dan Pakaian	40
Gambar 5.5	Pendapat Masyarakat Mengenai Kondisi Fisik Bangunan Pasar dan Pemasaran Hasil Pertanian.....	41
Gambar 5.6	Pendapat Masyarakat Mengenai Kondisi Keamanan Lingkungan	44
Gambar 5.7	Pendapat Masyarakat Mengenai Kejadian Konflik	44
Gambar 5.8	Pendapat Masyarakat Mengenai Perkembangan Kesejahteraan	45

BAB 1

PENDAHULUAN

<http://www.bps.go.id>

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Diawali pada tahun 2000 dengan terbentuknya Provinsi Banten yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, kemudian disusul terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena ini sepertinya cepat mengembang. Belum selang sebulan setelah itu, terbentuk Provinsi Gorontalo yang memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian menyusul pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (dari Provinsi Riau), Provinsi Maluku Utara (dari Provinsi Maluku), Provinsi Papua Barat (dari Provinsi Papua) dan terakhir Sulawesi Barat (dari Sulawesi Selatan). Pertimbangan yang mendasari pembentukan provinsi-provinsi baru tersebut adalah aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan. Pemekaran wilayah juga memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya^{1.1}. Faktor lain yang menjadi penyebab utama suatu wilayah menginginkan melepaskan diri dari wilayah induknya, adalah kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang menunjang otonomi daerah^{1.2}. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 (1) menyebutkan "daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah."

^{1.1} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

^{1.2} Rizky Argama, "Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia", (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, Desember 2005), hlm. 12.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pemekaran daerah melainkan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah^{1.3}. Mengenai pemekaran daerah secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan "daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah^{1.4}". Secara lebih rinci mengenai persyaratan pemekaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pembentukan, nama, batas, dan ibukota suatu daerah ditetapkan dengan Undang-undang^{1.5}. Adapun dasar pembentukan provinsi-provinsi baru yang terbentuk sampai akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Tujuan Penelitian

Studi ini memfokuskan pembahasan mengenai pemekaran daerah provinsi yang terjadi setelah ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 sampai akhir tahun 2006. Salah satu isi dari perubahan kedua adalah pasal 18 yang menyangkut pemerintahan daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran pemerintahan daerah provinsi;

^{1.3} Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 (5).

^{1.4} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 6 (2)

^{1.5} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 (2)

2. mengetahui dampak pemekaran pemerintahan daerah provinsi terhadap kesejahteraan masyarakat;
3. mengetahui persepsi masyarakat setelah terjadi pemekaran pemerintahan daerah provinsi.

1.3. Sistematika Penulisan

Hasil studi mengenai pemekaran pemerintahan daerah tingkat provinsi dipublikasi dalam publikasi tahunan Statistik Politik dan Keamanan 2007. Publikasi ini terdiri dari enam bab. Bab 1 Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 membicarakan metodologi yang membahas secara rinci mengenai pemilihan daerah studi, cakupan data, dan metode pengumpulan data.

Bab 3 mengulas mengenai pemekaran wilayah di Indonesia. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian yaitu sejarah pemekaran wilayah dari awal kemerdekaan sampai Orde Baru, dan pemekaran wilayah pada era Reformasi. Bab 4 membicarakan perkembangan secara rinci indikator sosial dan ekonomi wilayah pemekaran. Bab 5 mengulas pendapat masyarakat di wilayah pemekaran. Pembahasan dirinci menjadi faktor-faktor yang mendorong pemekaran wilayah, pendapat masyarakat tentang pelayanan masyarakat, perkembangan pembangunan perekonomian, perkembangan pengelolaan potensi daerah dan sarana sosial budaya, pendapat masyarakat tentang perkembangan keamanan, perkembangan kesejahteraan masyarakat. Bab 6 menyajikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB 2

METODOLOGI

<http://www.bps.go.id>

Bab 2

Metodologi

Bab Metodologi ini membahas mengenai pemilihan daerah studi yang meliputi pertimbangan-pertimbangan untuk pemilihan daerah, dan daerah-daerah terpilih untuk studi. Selain itu, bab ini membahas cakupan data dengan tujuan untuk membatasi permasalahan dan pembahasan. Bab ini membahas pula metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan studi pemekaran pemerintahan daerah tingkat provinsi.

2.1. Pemilihan Daerah Studi

Studi khusus tentang "Wacana Pemekaran Pemerintahan Daerah Provinsi" tahun 2007, dilaksanakan di provinsi yang baru dibentuk sejak era reformasi. Sampai akhir 2006 terdapat tujuh pemerintah daerah provinsi baru yang terbentuk, empat provinsi terdapat di wilayah bagian Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Tiga provinsi terdapat di wilayah bagian Barat Indonesia yaitu Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Idealnya semua provinsi baru menjadi wilayah studi, namun karena berbagai keterbatasan maka hanya dipilih beberapa provinsi. Pemilihan daerah studi berdasarkan pada pertimbangan: a) pemerintahan daerah baru yang telah melaksanakan pelayanan publik/melaksanakan roda pemerintahan; b) ada keterwakilan untuk wilayah Timur Indonesia dan wilayah Barat Indonesia; c) optimalisasi dengan ketersediaan dana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara *purposive sampling* terpilih sebagai daerah studi: Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo mewakili wilayah bagian Timur Indonesia. Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau untuk mewakili wilayah Barat Indonesia. Sebagai pembanding dipilih Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Madura yang sampai saat sekarang masih merupakan bagian dari Jawa Timur.

2.2. Sumber dan Cakupan Data

Studi ini menggunakan dua jenis data, data primer dari wawancara rumah tangga dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah persepsi masyarakat setelah pemekaran wilayah. Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber dikumpulkan untuk melakukan studi komparasi antar waktu, yaitu sebelum dan sesudah pemekaran. Data yang dikumpulkan dalam studi ini, terdiri dari banyaknya kabupaten/kota baru yang dibentuk di era otonomi daerah, serta informasi pembentukan wilayah pemerintahan provinsi baru, yang terdiri dari aspek pemerintahan, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Untuk melihat gambaran dimaksud pada tingkat provinsi, data yang diambil adalah catatan administrasi pembentukan, dan informasi terkait dengan masalah pembentukan wilayah pemerintahan.

Dengan mengacu pada kebutuhan data untuk tujuan komparasi antar waktu maka sasaran institusi yang dikunjungi dalam pengumpulan data adalah Kantor Gubernur/Pemerintahan Provinsi, Sekretariat Partai Politik, dan DPRD I.

2.3. Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden

Data survei dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden terpilih, yaitu sebanyak 200 rumah tangga untuk setiap provinsi terpilih, menggunakan kuesioner terstruktur. Pemilihan rumah tangga menggunakan metode *linier systematic sampling* untuk tiap-tiap blok sensus terpilih. Setiap blok sensus ditetapkan sampel sebanyak 20 rumah tangga. Suatu rumah tangga dapat dijadikan sebagai sampel apabila memenuhi ketentuan dalam rumah tangga tersebut setidaknya ada satu orang anggota rumah tangga yang telah tinggal di daerah sampel sejak sebelum terjadinya pemekaran. Setiap rumah tangga sampel selanjutnya dipilih seorang responden untuk diwawancarai. Responden adalah anggota rumah tangga dari rumah tangga sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) berusia antara 17 – 55 tahun, b) pernah mengalami masa sebelum pemekaran, c) berpendidikan paling tinggi dibanding anggota rumah tangga lainnya.

Data sekunder dikumpulkan melalui kompilasi data administrasi dari instansi terkait. Melalui data sekunder ini ditelaah perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat yang ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya serta keamanan. Perkembangan tersebut pada dasarnya merefleksikan perkembangan pembangunan sosial dari sebelum dan sesudah pemekaran.

BAB 3

PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA

<http://www.bps.go.id>

Dalam proses penyelenggaraan sebuah negara, paling tidak terdapat dua asas dalam hal penataan organisasi, yaitu pemusatan kekuasaan (sentralisasi), dan pembagian kekuasaan (desentralisasi). Asas sentralisasi lebih memungkinkan sebuah pemerintahan mengontrol semua aspek dalam kehidupan bernegara. Sisi positifnya adalah, kedaulatan sebuah negara dapat lebih terjaga, karena konflik lebih mudah untuk dinetralisir. Pengusung asas desentralisasi berpendapat bahwa, pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri mendorong percepatan pembangunan sebuah bangsa, terutama dibidang ekonomi. Desentralisasi memungkinkan daerah memotong rentang kendali yang panjang dari pusat, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, serta mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah tersebut.

Sebagai asas organisasi, Indonesia memandang bahwa sentralisasi dan desentralisasi merupakan suatu rangkaian kesatuan yang saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sebagai sebuah bangsa, berbagai aspek dinamik kerap mewarnai Indonesia dalam mengaplikasikan kedua asas tersebut dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga kejadian pemekaran di era reformasi.

3.1 Sejarah perundang-undangan pemekaran daerah

Perdebatan mengenai perlunya desentralisasi di nusantara ini sudah dimulai pada tahun 1880, jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Pada saat itu, anggota Dewan Rakyat (*Tweede Kamer*) yang didukung oleh kaum swasta Belanda yang bergerak di bidang perkebunan kerap menyuarakan mengenai perlunya desentralisasi pemerintahan di daerah jajahan Hindia Belanda. Kelompok ini merasa bahwa kekuasaan sentralistik di tangan seorang Gubernur Jenderal dianggap terlalu besar. Untuk mengurangi kekuasaan sentral yang berpusat di Belanda itu, pada tanggal 23 Juli 1903 undang-undang mengenai desentralisasi

pemerintahan Hindia Belanda mulai diundangkan. Undang-undang yang lengkapnya bernama *De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie* (dikenal sebagai *Decentralisatie Wet 1903*), diterima sidang *Twee de Kamer* dan diundangkan dalam *Staatsblad van Het Koninkrijk Der Nederlanden* tahun 1903 No 219 ^{3.1}.

Pada saat persiapan kemerdekaan negara Indonesia, para pendiri republik ini telah mengantisipasi ide mengenai otonomi daerah yang kemudian dituangkan ke dalam salah satu pasal dari lembaran konstitusi negara. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengusung ide mengenai pemerintahan daerah kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1945 yang dilegalkan pada tanggal 23 November 1945 ^{3.2}. Sebagai negara baru yang masih mencari bentuk sistem pemerintahan, jangkauan undang-undang ini masih sangat terbatas. Dengan dasar undang-undang ini, kemudian dilakukan pembentukan daerah-daerah otonom yang masih terbatas di Jawa.

Pada tanggal 10 Juli 1948 dikeluarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 sebagai pengganti UU No.1 tahun 1945 yang pada saat itu dianggap sudah tidak sesuai lagi. Undang-undang baru ini memberi ruang gerak daerah yang lebih luas dibanding sebelumnya. Guna menghidupkan pemerintahan lokal dan kesatuan sosial, dibentuk daerah tingkat III yang satuannya dapat berupa desa atau satuan yang setingkat. Akibatnya kontrol Pusat terhadap Daerah berkurang tajam. Tidak mengherankan di bawah undang-undang tersebut berlangsung berbagai pemberontakan daerah seperti DI, TII, PERMESTA, RMS, dan pemberontakan PKI di Madiun (Chalid, 2005).

Untuk mencegah bertambah kuatnya unsur kedaerahan pada saat itu yang dapat membuat disintegrasi negara, pemerintah mengeluarkan undang-undang No.1 Tahun 1957. Kandungan undang-undang baru ini lebih menekankan pada aspek keseimbangan antara pusat dan daerah. Jika UU No.1 Tahun 1945 lebih menekankan pada aspek dekonsentrasi, dan UU No.22 Tahun 1948 pada aspek desentralisasi, maka UU No.1 Tahun 1957 penekanan lebih jauh ke arah desentralisasi ^{3.3}. Pada awalnya hubungan pusat dan daerah terlihat lebih demokratis, namun demikian hal tersebut tidak berlangsung lama. Pembagian hasil bumi yang dirasakan timpang antara pusat dan daerah pada akhirnya menjadi pemicu utama undang-undang ini tidak mampu optimal diimplementasikan (Chalid, 2005).

^{3.1} Desentralisasi dalam tata pemerintahan kolonial Hindia-Belanda: kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia [1900-1940], Wignjosoebroto, Soetandyo, Malang : Bayu Media, 2004

^{3.2} UU no.1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan dan komite nasional daerah

^{3.3} <http://www.abc.net.au>

Pada pertengahan dekade 1960-an muncul tuntutan yang semakin kuat untuk merevisi sistem pemerintahan daerah agar sejalan dengan semangat Demokrasi Terpimpin dan Nasakom. Pada saat itu lahir undang-undang No.18 Tahun 1965. Namun demikian, adanya undang-undang ini tidak banyak mewarnai hubungan antara pusat dan daerah, karena kekacauan segera terjadi. Selain ditandai dengan 4 kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah, kabinet di era kepemimpinan Soekarno juga selalu memberi prioritas program kerja bagi desentralisasi, otonomi daerah, atau hubungan pusat dan daerah.

Berakhirnya pemerintahan Orde Lama dibawah kepemimpinan Soekarno, diteruskan oleh era pemerintahan Orde Baru. Kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunnya (Repelita) melaksanakan berbagai gagasan dan aktivitas pembangunan di hampir seluruh bidang kehidupan. Sistem pemerintahan bergaya militer yang amat sentralistik membuat pemerintahan dengan mudah mengontrol setiap letupan yang terjadi di masyarakat, sehingga keutuhan negara relatif lebih terjaga. Dari sisi pemerintahan, sisi negatif era orde baru adalah tidak meratanya perkembangan wilayah, terutama yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Meskipun banyak daerah berpotensi untuk maju karena memiliki banyak sumber daya, namun sumber daya tersebut lebih banyak dinikmati pusat. Untuk memperkuat pengaruh pusat atas daerah, masa jabatan kepala daerah dan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak sepenuhnya dipilih oleh Dewan. Secara formal mekanismenya adalah perpaduan antara kehendak Daerah (dengan mengusulkan tiga nama) dan kehendak Pusat (menentukan/memilih satu dari tiga yang diusulkan Dewan). Tetapi secara substantif, Kepala Daerah adalah orang Pusat yang ditempatkan di daerah (Chalid, 2005).

Cengkeraman otoritas sentralistik pemerintah pusat atas daerah, dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 1974. Ada tiga prinsip dasar yang dianut oleh Undang-undang no.5 Tahun 1974 ini, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun dalam prakteknya, prinsip dekonsentrasi yang lebih dominan. Hal ini menjadikan nisbinya ruang gerak yang memadai bagi tokoh-tokoh daerah untuk membangun kekuatan dengan identitas daerah.

Sejak era reformasi bergulir, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan dalam sistem bernegara. Harapan besar yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan yang berimbang pada setiap wilayah itu disuarakan melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi sendiri berasal dari kata *autonomos* atau *autonomia* yang dalam bahasa Yunani berarti 'keputusan sendiri'. Otonomi mengandung pengertian kondisi atau ciri

untuk tidak dikontrol oleh pihak lain atau kekuatan luar; atau bentuk pemerintahan sendiri, yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasib sendiri (*the right of self government*).

Sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde lama dan orde baru dianggap gagal, karena telah melahirkan ketimpangan antara pembangunan pusat dan daerah sehingga memicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat. Dengan demikian otonomi daerah diharapkan akan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat di daerah. Semangat desentralisasi tersebut diawali dengan terbitnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 7 Mei 1999, yang kemudian disusul dengan terbitnya Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada tanggal 19 Mei 1999. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat meleburkan hampir semua instansi vertikal yang ada di daerah serta melimpahkan sumber daya fisik dan manusia instansi tersebut kepada daerah. Dengan masa persiapan selama kurang lebih setahun sejak pengesahan kedua payung hukum tersebut, proses desentralisasi di Indonesia mulai digulirkan pada tahun 2001 (Taufiq, 2007). Dalam perjalanannya, pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2000.

Di masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah mengganti UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dengan menerbitkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, untuk memperketat syarat teknis pembentukan daerah, pemerintah mengganti PP no 129 tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang disahkan pada tanggal 10 Desember 2007. Perkembangan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1. Perkembangan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah

Tahun	Perundangan	Tentang
(1)	(2)	(3)
1903	Desentralisatie Wet 1903	Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di daerah jajahan Hindia Belanda
1945	UU No.1 tahun 1945	Diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 1945, dengan dasar pasal 18 UUD 1945, merupakan UU pemerintahan daerah yang pertama setelah kemerdekaan.
1948	UU No.22 tahun 1948	Sebagai pengganti UU no.1 tahun 1945, UU ini disahkan pada tanggal 10 Juli 1948,
1957	UU No.1 tahun 1957	UU tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang menekankan lebih jauh ke arah desentralisasi dibandingkan UU no.1/1945 dan UU no.22/1948
1965	UU No.18 tahun 1965	UU pemerintahan daerah yang sejalan dengan semangat demokrasi terpimpin dan nasakom
1974	UU No.5 tahun 1974	UU pemerintahan daerah pada masa orde baru
1999	UU No.22 tahun 1999	UU pemerintahan daerah pertama di era reformasi, disahkan pada tanggal 7 Mei 1999
	UU No.25 tahun 1999	UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disahkan pada tanggal 19 Mei 1999
2000	PP No.129 tahun 2000	Peraturan Pemerintah tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, ditetapkan tanggal 13 Desember 2000.
2004	UU No.32 tahun 2004	UU pemerintahan daerah yang baru sebagai pengganti UU no.22 tahun 1999
2007	PP No.78 tahun 2007	Peraturan Pemerintah tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, yang disahkan pada tanggal 10 Desember 2007.

3.2 Perkembangan Wilayah di Awal Kemerdekaan Hingga Orde Baru

Bermodalkan semangat untuk tidak mau tunduk pada penjajahan, serta di tengah segala keterbatasan sarana dan prasarana, para pendiri negara ini berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara bagian ditambah 1 Republik Indonesia. Tiga pihak tersebut yaitu, Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)*, dan Belanda, serta disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Secara resmi, Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 terdiri dari beberapa negara bagian, yaitu:

1. Republik Indonesia
2. Negara Indonesia Timur
3. Negara Pasundan
4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura
6. Negara Sumatra Timur
7. Negara Sumatra Selatan

Di samping itu, terdapat negara-negara yang berdiri sendiri dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:

1. Jawa Tengah
2. Kalimantan Barat
3. Dayak Besar
4. Daerah Banjar
5. Kalimantan Tenggara
6. Kalimantan Timur
7. Bangka
8. Belitung
9. Riau

Setelah bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan untuk pertama kalinya dilaksanakan pemekaran wilayah provinsi. Pada saat itu Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Utara (termasuk Aceh di dalamnya), Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Yogyakarta mendapat status "Daerah Istimewa" terlepas dari Provinsi Jawa Tengah. Dalam bentuk NKRI setelah Indonesia melepaskan diri dari bentuk negara RIS, wilayah pemerintahan provinsi di Indonesia tercatat sebanyak 11 wilayah, dengan susunan sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Sumatera Tengah
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Jawa Barat
5. Provinsi Jawa Tengah
6. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
7. Provinsi Jawa Timur
8. Provinsi Borneo
9. Provinsi Sulawesi
10. Provinsi Maluku; dan
11. Provinsi Sunda Kecil

Setelah pemekaran Provinsi Sumatera yang terjadi pada tahun 1950, perkembangan pemekaran wilayah di Indonesia hingga tahun 1966 berturut-turut adalah ^{3.4} :

- Tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus Ibukota". Pada tahun yang sama pula, Aceh dibentuk menjadi provinsi yang terpisah dari Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 1959 Provinsi Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".
- Tahun 1959, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk Provinsi Kalimantan Tengah (dari Kalimantan Selatan).

^{3.4} <http://www.wikipedia.org>

- Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia
- Tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari Sumatera Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan).

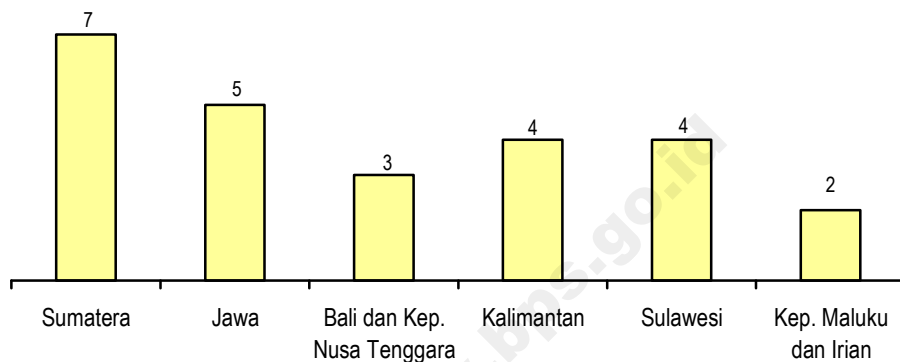
Perkembangan wilayah di Indonesia hingga tahun 1964 menghasilkan 25 wilayah provinsi, dengan susunan sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Jambi
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Sumatera Barat
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Lampung
8. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI)
9. Provinsi Jawa Barat
10. Provinsi Jawa Tengah
11. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
12. Provinsi Jawa Timur
13. Provinsi Kalimantan Barat
14. Provinsi Kalimantan Selatan
15. Provinsi Kalimantan Tengah
16. Provinsi Kalimantan Timur
17. Provinsi Sulawesi Utara
18. Provinsi Sulawesi Tengah
19. Provinsi Sulawesi Selatan
20. Provinsi Sulawesi Tenggara
21. Provinsi Bali
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 24. Provinsi Maluku
- 25. Provinsi Irian Barat

Dari uraian di atas terlihat bahwa selama masa pemerintahan Orde Lama, telah terjadi pembentukan wilayah pemerintahan provinsi sebanyak 14 wilayah, dimulai dari 11 provinsi (tahun 1950) hingga mencapai 25 provinsi pada masa akhir pemerintahan (tahun 1964). sebaran jumlah wilayah provinsi di akhir masa pemerintahan Orde Lama menurut pulau, dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar. 3.1 : Sebaran Jumlah Provinsi di Akhir Masa Pemerintahan Orde Lama, menurut Pulau



Di era pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1967, Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu, pada tahun 1969, Irian Barat secara resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 1974, Indonesia memiliki 26 provinsi, 2 provinsi berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 provinsi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (Jakarta). Pada tahun 1975, wilayah Indonesia berkembang lagi dengan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi yang ke-27. Kondisi tersebut bertahan hingga akhir periode pemerintahan orde baru.

3.3 Perkembangan Wilayah di Era Reformasi

Sejak diundangkannya UU no. 22 tahun 1999 di awal reformasi, telah membuka peluang yang cukup besar bagi suatu wilayah yang ingin memisahkan diri dari daerah induknya. Keinginan untuk dapat mengatur daerahnya sendiri itu didorong oleh keyakinan bahwa kekayaan sumber daya yang ada di daerah mereka seharusnya dapat membuat kehidupan masyarakat di daerah tersebut lebih baik. Selama ini mereka menilai bahwa ada ketidakadilan yang mereka terima dari daerah induk maupun dari pemerintahan pusat. Tidak mengherankan jika pemekaran yang terjadi sejak awal reformasi ini didominasi oleh wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan akan sumber daya, terutama sumber daya alam. Sebut saja semisal Provinsi Bangka Belitung yang kaya akan timah, Provinsi Kepulauan Riau dengan minyak bumi dan gas alam, Provinsi Banten dan Gorontalo dengan potensi sektor pertanian dan perikanan yang besar, Provinsi Sulawesi Barat dengan batubara, bijih besi, dan pasir kuarsanya, Provinsi Maluku Utara dengan nikel, emas, dan tembaganya, serta Provinsi Papua Barat yang kaya akan mineral (salah satunya adalah nikel) dan gas alam ^{3.5}. Selengkapannya, pemekaran wilayah provinsi pada era reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia yang ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999
2. Provinsi Banten dengan ibu kota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000
3. Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia yang ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000
4. Provinsi Gorontalo dengan ibu kota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000
5. Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2002
6. Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, menjadi provinsi Indonesia definitif pada tanggal 15 Januari 2003 dengan dasar Instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan Inpres no.1 tahun 2003 tentang Percepatan

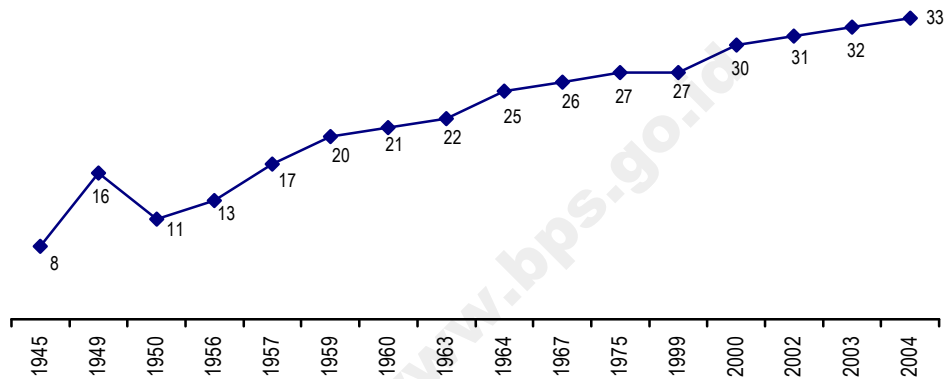
^{3.5} <http://www.indonesia.go.id>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang membagi Papua menjadi tiga provinsi.

7. Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia yang ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004

Selain diwarnai oleh maraknya pemekaran wilayah, tahun 1999 Indonesia juga kehilangan salah satu wilayah provinsinya. Berdasarkan hasil referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan saat itu Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Gambaran perkembangan jumlah wilayah provinsi yang ada di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga periode tahun 2007 dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar. 3.2: Perkembangan Jumlah Provinsi di Indonesia Tahun 1945-2004



<http://www.bps.go.id>

BAB 4
PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL
DAN EKONOMI

<http://www.bps.go.id>

Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi

Berkembangnya tuntutan pemekaran daerah, sesungguhnya merefleksikan harapan masyarakat akan perbaikan kesejahteraan. Dengan kata lain, pola pembangunan selama ini ternyata belum mampu menghasilkan pemerataan kesejahteraan, baik dalam arti ekonomi maupun akses untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi nyatanya hanya terjadi di beberapa pusat pertumbuhan, sedangkan pelayanan publik belum mampu menjangkau seluruh wilayah dengan kualitas yang merata. Banyak pihak berharap, melalui pemekaran daerah, rentang kendali dapat diperkecil, fasilitas pelayanan lebih dekat pada masyarakat, dan kegiatan ekonomi menjadi tersebar. Namun demikian, ada sinyal yang cukup mengkhawatirkan bahwa, menjamurnya pemekaran wilayah di Indonesia belakangan ini lebih didominasi muatan politis dari suatu kelompok elit, bukan atas aspirasi masyarakat bawah.

Efek desentralisasi menghasilkan wilayah administrasi baru, yang tentunya menyediakan dana yang lebih besar yang dapat dikelola oleh pemerintah setempat, khususnya Dana Alokasi Umum, yang pada era pra-desentralisasi hal tersebut tidak tersedia dan pengelolaannya didominasi oleh pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah telah meningkatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah tanpa perlu memperoleh persetujuan dari pemerintah di atasnya (Syaukani, dkk, 2005). Di sisi lain, pemekaran memungkinkan tersedianya jabatan baru yang ber-eselon tinggi, dimana pada posisi ini dapat menjadi ladang kepentingan para “elit” pendukung proses pemekaran.

Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 disebutkan bahwa syarat teknis yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan daerah baru meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam lampiran PP No 78 Tahun 2007 ini, syarat-syarat teknis tersebut telah diuraikan menjadi 35 indikator yang memiliki skor dengan skala 1-5, dimana skor Lima (5) masuk dalam kategori sangat mampu

Kotak 4.1.
Kekhasan Madura Sebagai Bagian dari Provinsi Jawa Timur

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 5.284 km². Madura merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi empat wilayah kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura menjadi bagian Provinsi Jawa Timur pada saat pembagian provinsi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920-an.

Penduduk asli Madura adalah Suku Madura dan berbahasa asli Madura. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2000, Suku Madura merupakan suku terbesar ketiga setelah Jawa dan Sunda, Priangan. Jumlah Suku Madura sekitar 6,8 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Wikipedia.com menyebutkan orang Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena keadaan wilayahnya yang kurang baik untuk pertanian. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor pendorong emigrasi berkepanjangan orang Madura. Berdasarkan SP 2000, Suku Madura yang masih tinggal di Madura sekitar 3,1 juta jiwa atau 45,6 % dari seluruh penduduk Suku Madura yang ada di Indonesia. Ini artinya lebih dari separuh Suku Madura tersebar di wilayah lain di luar Madura.

Madura secara geografis terpisah dari Pulau Jawa. Dilihat secara etnik, bahasa dan budaya, Madura mempunyai kekhasan sendiri yang berbeda dengan bahasa dan budaya Jawa (Jawa Timur). Kekhasan tersebut merupakan unsur kekayaan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur hingga saat ini.

dan skor Satu (1) masuk kategori sangat tidak mampu. Setiap indikator juga memiliki bobot penilaian yang berbeda, dimana hasil perkalian antara skor dan bobot dari masing-masing indikator akan menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah dimekarkan menjadi daerah administratif baru. Bab ini membahas perkembangan beberapa indikator bidang sosial dan ekonomi di lima provinsi hasil pemekaran.

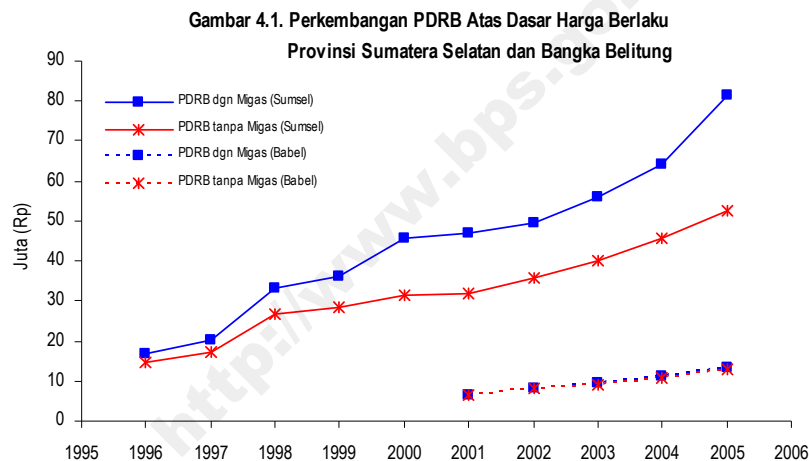
4.1. Perkembangan Indikator Ekonomi

Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah agar terciptanya efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan menghidupkan inisiatif dan kreatifitas pemerintah daerah dalam memperluas dan memperbaiki mutu pelayanan publik bagi masyarakatnya. Sedangkan visi desentralisasi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, dkk, 2005).

Pendekatan yang sering dipakai untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara didasarkan pada produk domestik bruto (PDB), sedangkan gambaran keadaan ekonomi suatu wilayah dicerminkan oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Untuk mengukur rata-rata pendapatan setiap penduduk suatu daerah, secara umum dicerminkan oleh pendapatan regional per kapita yang besarnya bergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk di daerah tersebut. Produk domestik regional bruto dan angka laju pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang secara makro dapat dijadikan tolok ukur

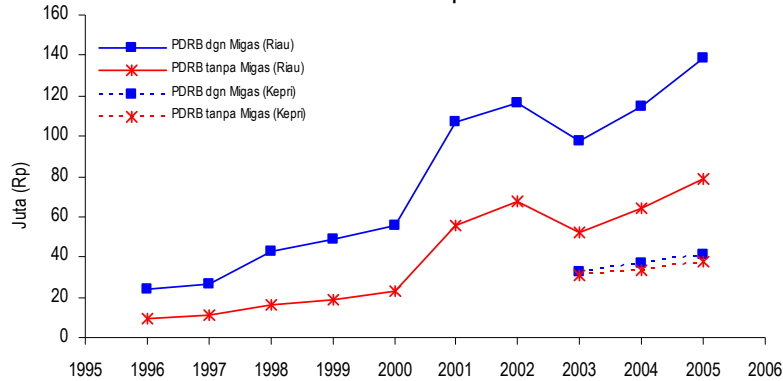
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB juga kerap dijadikan acuan untuk mengukur peluang terciptanya lapangan kerja baru serta memantau kondisi perubahan pendapatan masyarakat. Sedangkan angka perkembangan pendapatan perkapita digunakan untuk melihat secara makro perkembangan tingkat kesejahteraan individu dalam masyarakat. Gambaran perkembangan PDRB di wilayah studi provinsi hasil pemekaran dan provinsi induknya dapat dilihat pada gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.5.

Timah yang merupakan komoditas utama kepulauan Bangka Belitung telah sejak lama menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Eksplorasi tambang selama puluhan tahun tersebut kenyataannya tidak memiliki korelasi positif terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan penduduk di bumi Bangka dan Belitung. Keinginan kuat untuk memajukan daerahnya mendorong wilayah ini menjadi provinsi baru pada akhir tahun 2000. Pada masa awal lepasnya wilayah Kepulauan Bangka Belitung dari Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan PDRB Sumatera Selatan, meskipun mengalami kenaikan namun sangat tipis (Gambar 4.1). Gambar 4.1 juga menjadi bukti positif dari pemekaran wilayah yang terlihat dari semakin meningkatnya PDRB Provinsi Bangka Belitung.



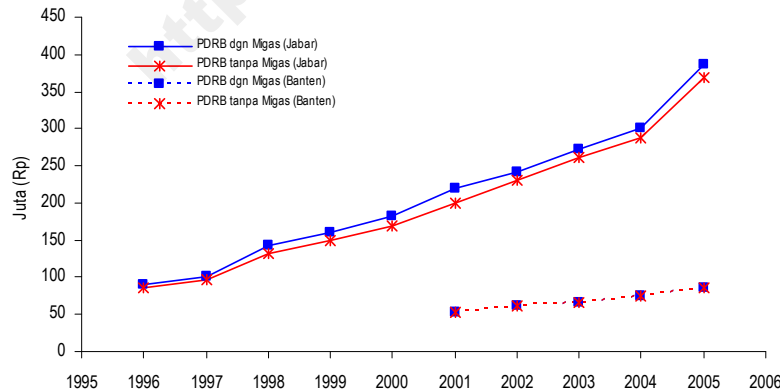
Pemisahan wilayah Kepulauan Riau menjadi provinsi baru menjadi salah satu kontribusi dari turunya PDRB Provinsi Riau pada tahun awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2002. Kenyataan ini menunjukkan, wilayah Kepulauan Riau yang kaya akan minyak bumi, gas, dan sumber daya bahari memberikan kontribusi yang cukup besar bagi provinsi induknya.

**Gambar 4.2. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Riau dan Kepulauan Riau**

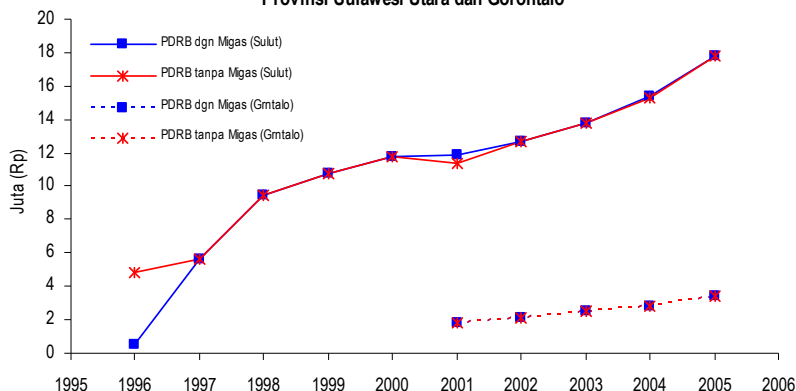


Gambar 4.2 hingga gambar 4.5 memperlihatkan bahwa pertumbuhan PDRB di semua provinsi baru cenderung mengalami peningkatan sejak awal periode pemekarannya. Kondisi ini, bisa jadi disebabkan oleh tingginya aktivitas pembangunan atau semakin tersentuhnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara cukup merata pada berbagai tingkat wilayah pemerintahan dalam wilayah geografis provinsi. Fenomena ini dapat memberikan gambaran sementara bahwa pembentukan wilayah baru pemerintahan provinsi merupakan salah satu solusi untuk pemerataan pembangunan antar daerah dalam republik ini. Gambar-gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa PDRB, baik di provinsi induk maupun di provinsi baru hasil pemekarannya cenderung bergerak naik. Hal tersebut sekaligus menjadi bukti positif dari pemekaran wilayah provinsi di Indonesia.

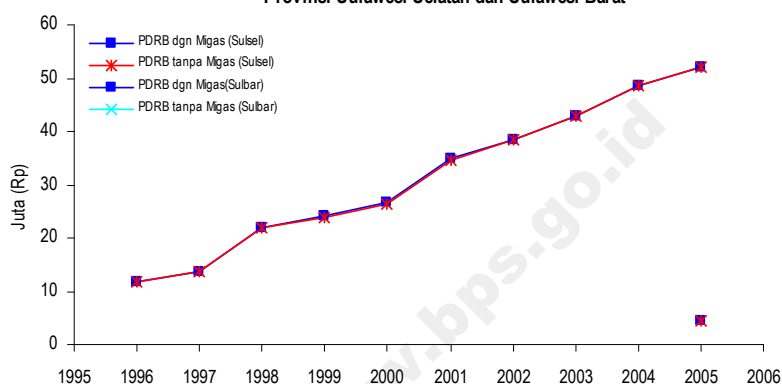
**Gambar 4.3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Jawa Barat dan Banten**



**Gambar 4.4. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo**

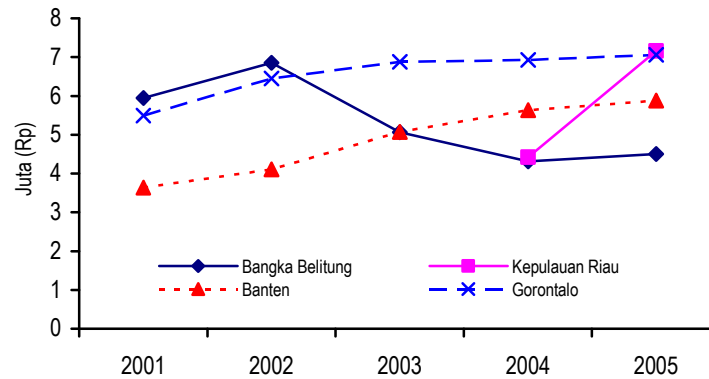


**Gambar 4.5. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**



Di beberapa daerah, minyak bumi dan gas merupakan kekayaan alam yang paling banyak berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, kekayaan alam ini merupakan sumber daya yang bersifat terbatas, artinya suatu saat pasti akan habis. Kemajuan pembangunan suatu wilayah pada dasarnya tercermin dari kualitas manusia di daerah tersebut untuk dapat mengembangkan potensi sekecil apapun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, tanpa bergantung pada sumber daya alam, terlebih yang bersifat terbatas, semisal minyak bumi dan gas. Negara Jepang yang miskin sumber daya alam saat ini ternyata mampu bergerak lebih maju dibandingkan Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah. Dengan dasar hal tersebut, PDRB tanpa migas cenderung lebih tepat untuk melihat laju pertumbuhan suatu wilayah serta pendapatan per kapita individu di wilayah tersebut.

Gambar 4.6. Laju Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Empat Provinsi Pemekaran



Kotak 4.2. Tingkat Perekonomian Madura

Pembangunan perekonomian suatu daerah sering diindikasikan dengan PDRB dan tingkat kemiskinan penduduknya. Pada tahun 2006, PDRB per kapita di Madura masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur (BPS, 2007). Di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2006, PDRB dengan migas hanya mencapai 3,7 juta per kapita, sementara untuk wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 12,9 juta per kapita. Tabel A1 menyajikan PDRB per kapita untuk setiap wilayah kabupaten di Madura.

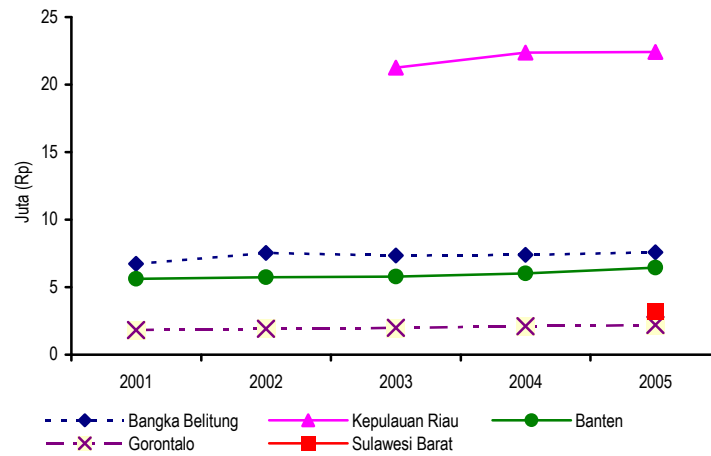
Tabel A1: PDRB dan Persentase Penduduk Miskin di Madura menurut Kabupaten, 2006

Kabupaten	PDRB per Kapita dengan Migas (Rp.)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Bangkalan	5.345.191	33,53
Sampang	4.311.881	41,03
Pamekasan	3.707.148	34,14
Sumenep	7.428.482	34,86
Jawa Timur	12.861.333	21,09

Secara keseluruhan, Madura termasuk salah satu daerah miskin di provinsi Jawa Timur. Seperti tersaji pada Tabel A1, sekitar sepertiga penduduk di setiap kabupaten di Madura adalah penduduk miskin. Di Kabupaten Sampang penduduk miskin bahkan mencapai sekitar 41 persen. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Sampang sebagai wilayah yang mempunyai proporsi penduduk miskin terbesar di Jawa Timur.

Kegiatan eksplorasi timah yang makin berkurang di Provinsi Bangka Belitung agaknya menjadi salah satu sebab laju pertumbuhan ekonomi di provinsi ini turun di tahun 2003-2004. Pertumbuhan PDRB di tiga provinsi lainnya yaitu, Banten, Kepulauan Riau, dan Gorontalo cenderung bergerak naik (Gambar 4.6). Rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah diukur dengan pendekatan PDRB per kapita yang besarnya bergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk di daerah tersebut. Gambar 4.7 memperlihatkan perkembangan PDRB per kapita di lima provinsi wilayah studi.

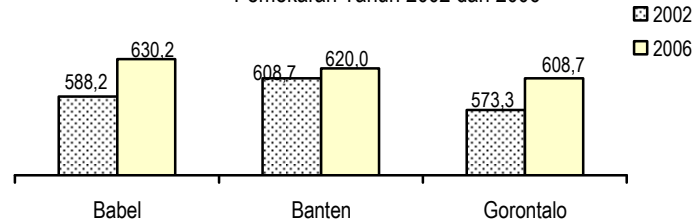
Gambar 4.7. Perkembangan PDRB per Kapita (Tanpa Migas) atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Lima Provinsi Pemekaran



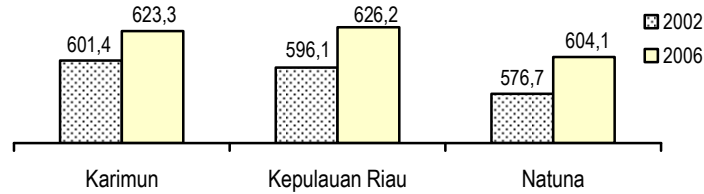
Namun demikian, meningkatnya PDRB per kapita di suatu daerah tidak otomatis berbanding lurus dengan tingkat daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena nilai PDRB per kapita suatu daerah tidak menggambarkan daya beli riil dari masyarakat. Meskipun PDRB mengukur produksi yang dihasilkan suatu daerah, karena tingginya integrasi ekonomi antar wilayah di Indonesia, maka tidak ada jaminan bahwa sebagian besar produksi di suatu daerah akan didistribusikan di antara masyarakat setempat. Oleh karena itu pengeluaran per kapita yang dihimpun dalam Susenas merupakan pendekatan dari daya beli masyarakat lokal yang lebih baik. Paritas daya beli (*Purchasing power parity* - PPP) memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan^{4.1}. Gambaran paritas daya beli dari lima provinsi pemekaran yang jadi wilayah studi, dapat dilihat pada gambar 4.8 sampai dengan gambar 4.10.

^{4.1} Laporan pembangunan manusia Indonesia 2004

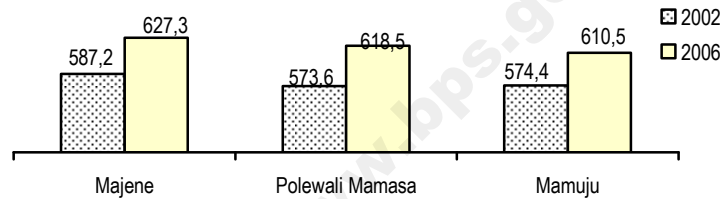
Gambar 4.8. Paritas Daya Beli di Tiga Provinsi Hasil Pemekaran Tahun 2002 dan 2006



Gambar 4.9. Paritas Daya Beli di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006



Gambar 4.10. Paritas Daya Beli di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2002 dan 2006

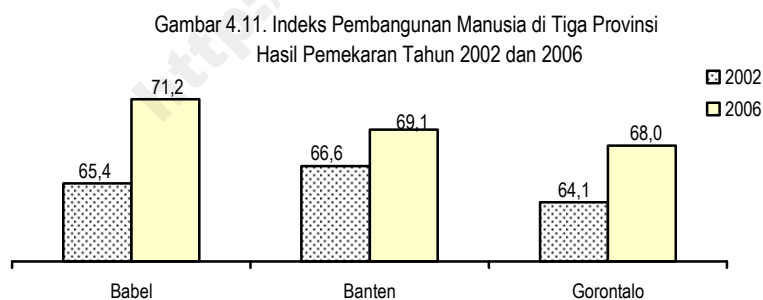


Berbeda dengan konsep pembangunan tradisional yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, pada tahun 1990 Amartya Sen dan Mahbub ul Haq dibantu oleh Gustav Ranis dan Lord Meghnad Desai, mengembangkan konsep pembangunan yang lebih sensitif dan berguna, yang kemudian dikenal dengan konsep pembangunan manusia.

Ide ini kemudian digunakan oleh PBB untuk memantau kemajuan sebuah negara dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Ide ini juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam kalimat pembuka *Human Development Report (HDR)* 1990 tertulis bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk

menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif^{4.2}. Pesan penting dalam HDR 1990 ini menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebagai alat pembangunan.

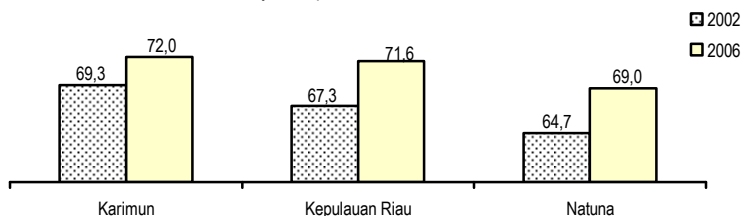
Dalam cakupan wilayah kecil setingkat daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), pemekaran wilayah bisa berdampak negatif bagi pemerataan pembangunan. Sebagai contohnya, dengan dimekarkannya Banggai menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan, IPM untuk Banggai Kepulauan merosot 1,6 persen sementara Kabupaten Banggai mengalami kenaikan sebesar 4 persen. Fakta tersebut memberi pengertian bahwa daerah yang lebih kaya di wilayah tersebut, yang menganggap bahwa daerah yang lebih terbelakang menghalanginya untuk maju, memutuskan untuk maju sendiri. Gejala yang belakangan sering disebut sebagai "aspirasi untuk tidak setara" ini semakin dipertegas oleh besarnya perbedaan antara kabupaten yang memiliki IPM tertinggi (Jakarta Timur dengan nilai 76), dengan IPM terendah (Jayawijaya dengan nilai 47)^{4.3}. Namun demikian, dalam cakupan wilayah yang lebih luas semisal provinsi, pemekaran wilayah cenderung berdampak positif, baik untuk daerah induk maupun daerah baru hasil pemekarannya (Lihat gambar 4.1 sampai gambar 4.5). Dalam laporan pembangunan manusia global, Swedia hanya berada pada peringkat 18 dalam hal pendapatan per kapita tetapi duduk pada peringkat ketiga dalam hal IPM. Indikasi ini mencerminkan bentuk pembangunan yang adil dan negara yang mementingkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Gambaran indeks pembangunan manusia dari lima provinsi pemekaran yang jadi wilayah studi, dapat dilihat pada gambar 4.11 sampai dengan gambar 4.13.



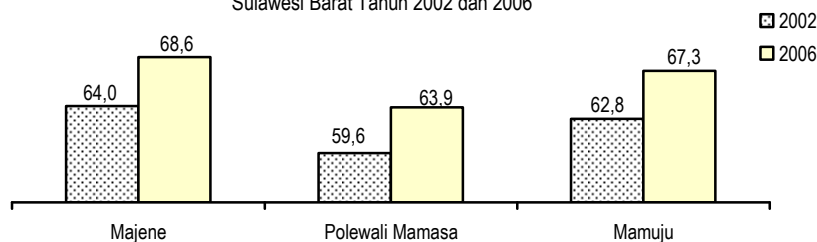
^{4.2} Human Development Report, UNDP, 1990

^{4.3} Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, 2004

Gambar 4.12. Indeks Pembangunan Manusia di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006



Gambar 4.13. Indeks Pembangunan Manusia di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2002 dan 2006



4.2. Perkembangan Indikator Sosial

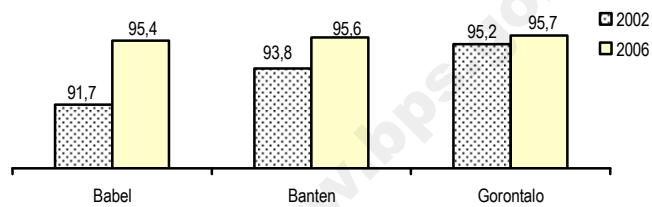
Salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena peningkatan IPM suatu daerah dapat mencerminkan kemajuan penduduk secara keseluruhan. Peningkatan IPM juga berhubungan langsung dengan perbaikan indikator-indikator sosial, misalnya angka melek huruf, angka kematian bayi, dan persentase balita kurang gizi. Perbaikan IPM biasanya juga diiringi oleh berkurangnya kemiskinan konsumsi.

Metode penghitungan kemiskinan yang didasarkan pada pendapatan melalui pendekatan pengeluaran konsumsi per kapita dalam rumah tangga, mampu memberi beberapa petunjuk tentang lingkup kemiskinan pendapatan. Namun demikian, penghitungan ini menyembunyikan fakta bahwa banyak kelompok rentan yang keluar masuk kategori miskin. Sepertiga hingga setengah jumlah penduduk dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan, misalnya akibat kenaikan bahan bakar minyak. Angka kemiskinan pendapatan juga tidak dapat mengungkapkan kenyataan bahwa seseorang dapat jatuh miskin bukan saja karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, tapi karena tertinggal dalam banyak hal.

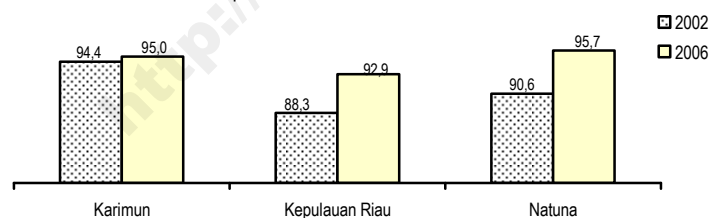
Misalnya tertinggal dalam hal pendidikan, memiliki tingkat kesehatan yang buruk, atau hidup dalam lingkungan yang tidak aman ^{4.4}.

Tujuan kedua *Millennium Development Goal's* Indonesia menargetkan pendidikan dasar untuk semua. Indikator yang digunakan untuk mengukur target semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar di tahun 2015 adalah angka partisipasi murni (SD dan SMP) dan angka melek huruf. Era desentralisasi saat ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah, terutama daerah hasil pemekaran, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia, idealnya menjadi prioritas penting dalam kerangka kerja pemerintahan daerah. Secara tidak langsung pembangunan manusia berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan angka melek huruf di tiga provinsi pemekaran yang menjadi wilayah studi (Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo) diperlihatkan pada gambar 4.14, sedangkan perkembangan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat diperlihatkan pada gambar 4.15 dan gambar 4.16.

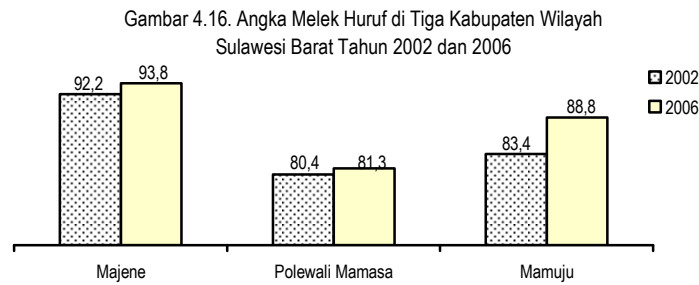
Gambar 4.14. Angka Melek Huruf di Tiga Provinsi Pemekaran Tahun 2002 dan 2006



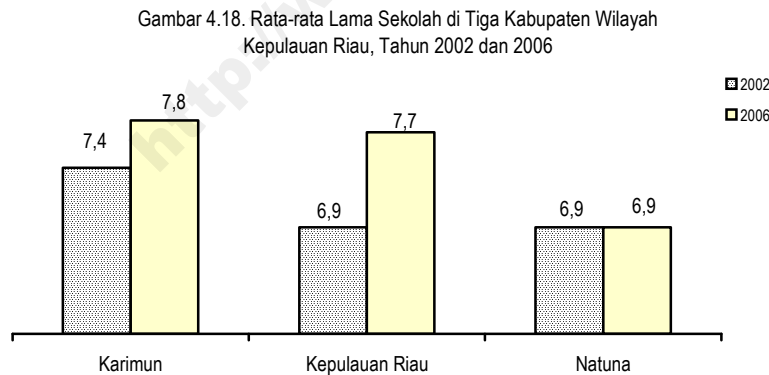
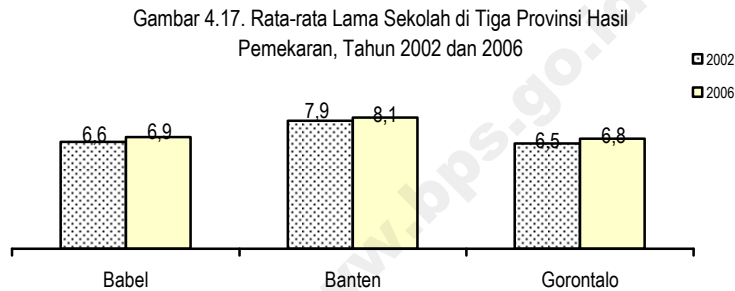
Gambar 4.15. Angka Melek Huruf di Tiga Kabupaten Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2002 dan 2006



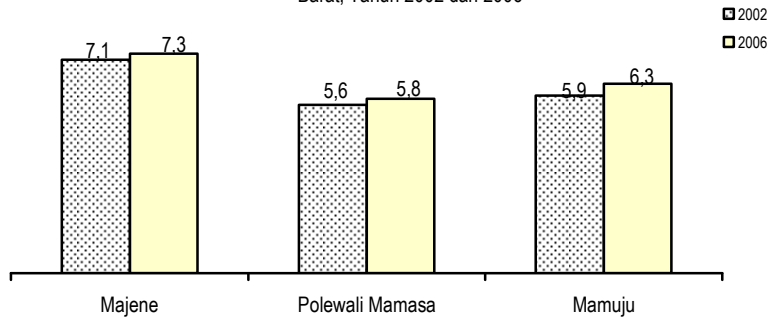
^{4.4} Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, 2004



Tingkat melek huruf yang meningkat di semua provinsi wilayah studi, berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah anak yang bersekolah. Hal ini dapat terjadi seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan pendidikannya. Semakin banyak jumlah anak yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar artinya, ada kecenderungan mereka terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini berkorelasi dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah di suatu daerah (Gambar 4.17 – 4.19).



Gambar 4.19. Rata-rata Lama Sekolah di Tiga Kabupaten Wilayah Sulawesi Barat, Tahun 2002 dan 2006



Kotak 4.3.
Tingkat Pembangunan Sosial di Madura

Tingkat pembangunan sosial secara komposit tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang tersusun dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat. Tabel A2 menyajikan tingkat pencapaian IPM di Madura pada tahun 2006 yang dirinci menurut kabupaten.

Tabel A2: Tingkat Pencapaian IPM di Madura, 2006

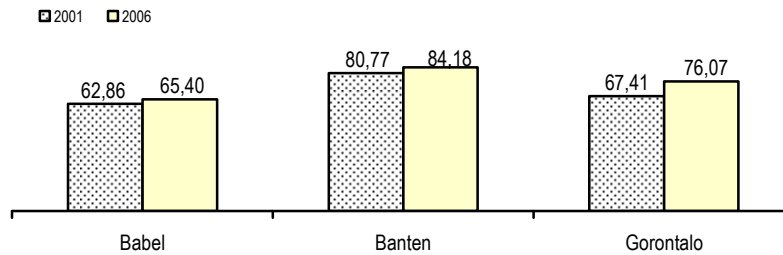
Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Angka Melek Huruf (persen)	Pengeluaran riil/kapita 2006 disesuaikan (Rp. 000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangkalan	62,7	5,0	82,8	615,5	62,7
Sampang	60,4	3,8	64,1	613,9	56,3
Pamekasan	62,4	5,5	79,5	612,8	62,0
Sumenep	64,0	4,9	78,6	623,7	63,1
Jawa Timur	68,6	6,9	87,1	626,0	69,2

Tabel A2 menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan pendidikan. Penduduk Madura pada tahun 2006 rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal sampai kelas 5. demikian pula halnya dengan angka melek huruf, relatif sangat rendah. Ini semua mengakibatkan nilai IPM daerah Madura rendah. Dari 456 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2006, kabupaten di Madura berturut-turut menempati posisi 430, 449, 435 dan 426.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sudut pandang pembangunan manusia, selain memajukan pendidikan, juga memerlukan manusia yang sehat agar mampu berdaya guna optimal. Menurut Laporan Pembangunan Manusia 2006, nyawa yang direngut oleh krisis air global melalui berbagai jenis penyakit jauh lebih besar dari korban perang akibat senjata. Sekitar 1,1 milyar penduduk di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap air, 720 juta di antaranya berada di Asia. Ada sekitar 2,6 milyar penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak, 1,9 juta

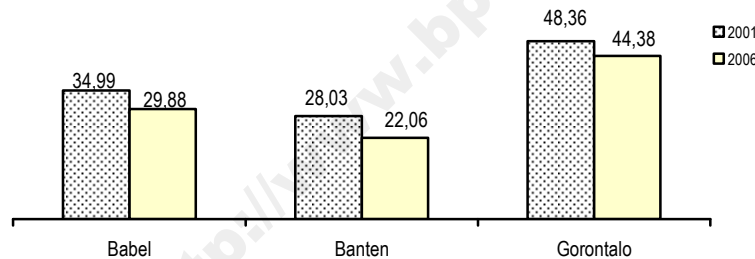
di antaranya berada di Asia (UNDP, 2006). Indonesia memberi prioritas menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air bersih serta tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar, yang termaktub dalam *Millennium Development Goal's*, Tujuan ke tujuh, target ke sepuluh.

Gambar 4.20. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih di Tiga Provinsi Pemekaran, Tahun 2001 dan 2006



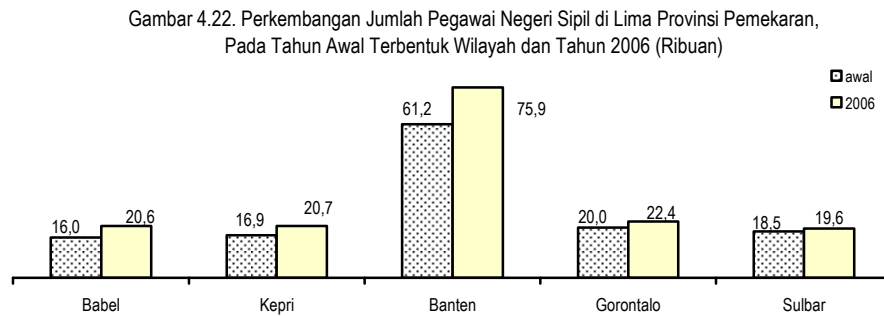
Laporan pembangunan manusia 2006 mengungkapkan bahwa perbaikan sanitasi dapat memperbaiki pembangunan manusia, karena perbaikan sanitasi dapat melindungi manusia, khususnya anak-anak, dari berbagai sumber penyakit. Perbaikan sanitasi secara tidak langsung dapat mengangkat manusia dari jurang kemiskinan, meningkatkan produktifitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Laporan ini juga menyatakan fakta bahwa hampir separuh penduduk di negara-negara berkembang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak (UNDP, 2006).

Gambar 4.21. Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di 3 Provinsi Pemekaran, Tahun 2002 dan 2006

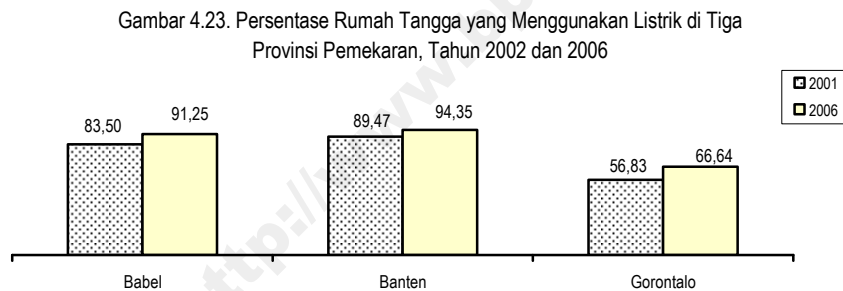


Selain faktor pendidikan dan kesehatan, indikator sosial lain yang dapat dijadikan acuan perkembangan pemerintahan daerah baru adalah keberadaan prasarana fisik dan pemerintahan. Hadirnya pemerintahan provinsi baru kerap diiringi dengan pembentukan kecamatan baru, pengembangan fasilitas pelayanan publik, dan kesempatan kerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Menurut laporan pembangunan manusia Indonesia 2004, perkembangan positif yang lain dari desentralisasi adalah, perubahan tanggung jawab atas sekitar 2,2 juta PNS yang bersamaan dengan pengelolaan atas lebih dari 16.000 fasilitas pelayanan publik, dari tingkat pusat yang dialihkan ke daerah. Perkembangan jumlah PNS di

tahun awal provinsi tersebut berdiri dan di tahun 2006, di lima provinsi wilayah studi, tersaji pada gambar 4.22.



Seputar wilayah yang akan dijadikan ibu kota provinsi dapat dipastikan akan disertai dengan peningkatan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, listrik, telepon, dan lain-lain. Dalam konteks masyarakat lokal yang demikian, pemekaran daerah merupakan cara masyarakat untuk “memaksa” pemerintah pusat agar memperhatikan pembangunan di daerah. Dengan asumsi tersebut, peningkatan prasarana fisik di daerah pemekaran bisa menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Perkembangan rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan non PLN) di tiga provinsi pemekaran dapat dilihat pada gambar 4.23.



<http://www.bps.go.id>

BAB 5
PENDAPAT MASYARAKAT WILAYAH
PEMEKARAN

<http://www.bps.go.id>

Pendapat Masyarakat Wilayah Pemekaran

Tujuan dari pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Ini artinya masyarakat yang semestinya merasakan manfaat dan keuntungan dari pemekaran daerah.

Terdapat enam^{5.1} hal yang dapat menjadi indikasi adanya peningkatan kesejahteraan yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. Bab ini mengulas persepsi masyarakat tentang faktor-faktor yang mendorong pemekaran dan tentang kinerja pemerintahan baru setelah mengalami pemekaran.

5.1. Faktor-faktor yang Mendorong Pemekaran Wilayah

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah. Faktor-faktor yang menunjang tersebut menjadi pendorong utama suatu wilayah menginginkan melepaskan diri dari provinsi induknya. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000 disebutkan syarat-syarat pembentukan daerah meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebagai syarat pembentukan daerah. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan^{5.2}. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan

^{5.1} Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

^{5.2} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 5 Ayat (1),

wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis mengharuskan suatu daerah baru yang terbentuk telah memenuhi kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, provinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari tiga kabupaten dan atau kota^{5.3}.

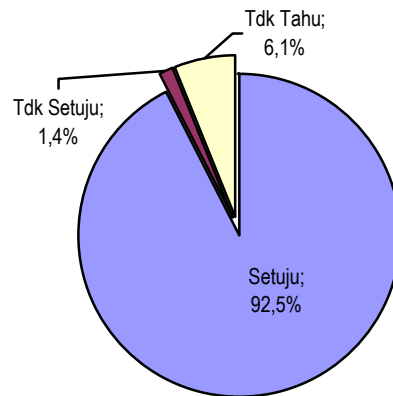
Jumlah penduduk menjadi salah satu syarat pembentukan. Meskipun tidak disebutkan besaran penduduk secara eksplisit namun syarat ini menunjukkan ukuran secara kuantitas. Selain kuantitas patut dipertimbangkan pula pandangan masyarakat mengenai pembentukan daerah. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi karena tujuan pemekaran adalah kesejahteraan masyarakat. Kalaupun persyaratan pembentukan telah terpenuhi sementara tidak mendapat dukungan masyarakat maka tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.

Sekitar 92,5 persen masyarakat di provinsi baru setuju bahwa pembentukan daerah mutlak diperlukan. Persetujuan masyarakat ini merupakan bentuk dukungan yang bermanfaat sebagai modal untuk membangun provinsi baru. Selain jumlah penduduk menjadi kriteria pemekaran daerah, salah satu prosedur pembentukan daerah adalah adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan^{5.4}. Dijelaskan yang dimaksud dengan kemauan politik dari Pemerintah daerah dan masyarakat adalah adanya pernyataan-pernyataan masyarakat melalui LSM-LSM, organisasi-organisasi politik dan lain-lain, pernyataan Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan, yang selanjutnya dituangkan secara resmi dalam bentuk persetujuan tertulis baik melalui Kepala Daerah dan DPRD yang bersangkutan.

^{5.3} Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pasal 10 (d).

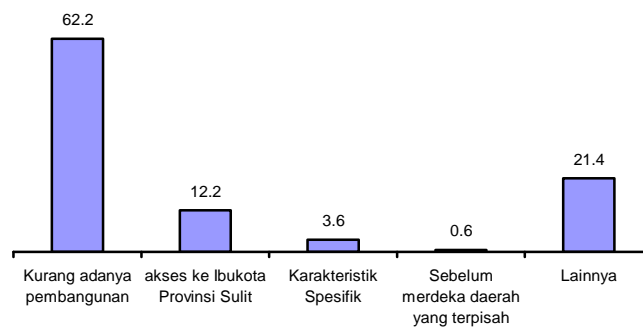
^{5.4} Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pasal 16 (1) a .

Gambar 5.1:
Pendapat Masyarakat Provinsi Pemekaran tentang
Pemekaran Wilayah



Masyarakat yang menyetujui pemekaran beralasan karena merasa kurang adanya kegiatan pembangunan (62,2 persen), akses ke ibukota provinsi lama sulit (12,2 persen), daerah mereka mempunyai karakteristik yang spesifik (3,6 persen), daerah mereka sudah ada sebelum Indonesia merdeka (0,6 persen), dan lainnya (21,4 persen). Perasaan termarginalkan dalam hal pembangunan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat di provinsi pemekaran. Tampaknya menjadi alasan yang menguat sehingga menjadi politik identitas untuk memisahkan diri dari provinsi induk. Menurut Judy Rebick dalam Yudi Latif (2004), "Politik identitas kerap kali muncul sebagai aktifitas resistensi terhadap proses marginalisasi yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat-bangsa." Puncak resistensi identitas tersebut memunculkan keinginan untuk memisahkan diri dari provinsi induk.

Gambar 5.2:
Alasan Masyarakat Provinsi Pemekaran yang Menyetujui Pemekaran Wilayah



Kotak 5.1
Jembatan Suramadu Menyatukan Madura dengan
Wilayah Jawa Timur Lainnya

Selama ini akses Madura ke Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah penyeberangan kapal feri Perak-Kamal. Penyeberangan yang padat ini dipastikan akan tersaingi setelah pembangunan jembatan Suramadu (Surabaya – Madura) selesai. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Surabaya di Jawa dan kota Bangkalan di Madura. Jembatan tersebut direncanakan akan memiliki panjang jembatan 5.438 meter yang meliputi causeway sisi Surabaya 1.458 meter, causeway sisi Madura 1.818 meter, plus bentang tengah sepanjang 2.162 meter.

Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dikukuhkan sebagai proyek nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 tentang Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura yang sekaligus memutuskan untuk membentuk tim pada 14 Desember 1990. Namun pembangunannya sempat tertunda akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Di era reformasi dengan semangat desentralisasi mendorong pemerintah Jawa Timur berkeinginan mengambil alih tanggung jawab pembangunan jembatan Suramadu. Seiring membaiknya kondisi perekonomian, pemerintah pusat merespon dengan Keputusan Presiden Nomor 79 tanggal 27 Oktober 2003 tentang pembangunan Jembatan Surabaya-Madura yang menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Suramadu dapat dilanjutkannya kembali.

Jembatan Suramadu, yang akan menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya melalui jalan darat, merupakan gerbang terhubungnya Madura dengan wilayah lain di Jawa Timur. www.suramadu.com menyebutkan bahwa dengan jembatan ini diharapkan ketimpangan sosial dapat segera direduksi. Arus transportasi yang cepat dan efektif akan membuat perkembangan Madura segera melejit, bersaing dengan daerah-daerah lain.

Pendapat masyarakat yang menilai kurang adanya pembangunan di bawah provinsi induk semestinya menjadi motivasi bagi kinerja pemerintahan provinsi baru. Masyarakat mendambakan perubahan ke arah yang lebih baik pada semua aspek dan kehidupan lebih sejahtera dibanding sebelum pemekaran. Aspirasi masyarakat ini hendaknya menjadi landasan dalam melakukan pemerintahan provinsi baru, sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan dalam Pasal 4 (1) UU Nomor 22 Tahun 1999: "Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat".

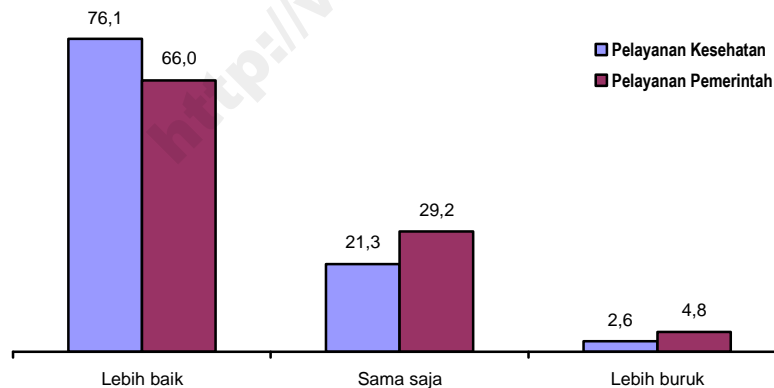
5.2. Pendapat Masyarakat tentang Pelayanan Masyarakat

Pemekaran wilayah merupakan upaya memperoleh hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud nyata upaya meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat adalah pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, setelah terjadi pemekaran?

Salah satu jenis pelayanan yang ditanyakan dalam survei ini adalah pelayanan kesehatan. Pada pelayanan kesehatan, sekitar 76,1 persen masyarakat mengungkapkan bahwa kondisi pelayanan kesehatan lebih baik. Ini merupakan indikator subyektif dari persepsi masyarakat yang menunjukkan adanya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Tampaknya upaya pemerintahan baru dalam meningkatkan pelayanan bidang kesehatan telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hanya sekitar 2,6 persen masyarakat menyatakan kondisi pelayanan kesehatan lebih buruk. Mungkin kekurangan fasilitas sebagai propinsi baru menjadi penyebab.

Demikian pula mengenai pelayanan pemerintah secara umum kepada masyarakat, sekitar 66,0 persen masyarakat menyatakan lebih baik. Meskipun angkanya lebih rendah dibanding pelayanan bidang kesehatan, namun angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu dua dari tiga penduduk di provinsi pemekaran merasakan bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih baik dibandingkan dengan sebelum memisahkan diri dari provinsi induk. Ini merupakan cerminan bahwa upaya meningkatkan pelayanan publik di provinsi pemekaran telah mulai dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Gambar 5.3 menyajikan persentase masyarakat menurut pendapat mereka mengenai pelayanan publik pemerintah provinsi pemekaran yang dibandingkan dengan pelayanan pemerintahan sebelum memisahkan diri.

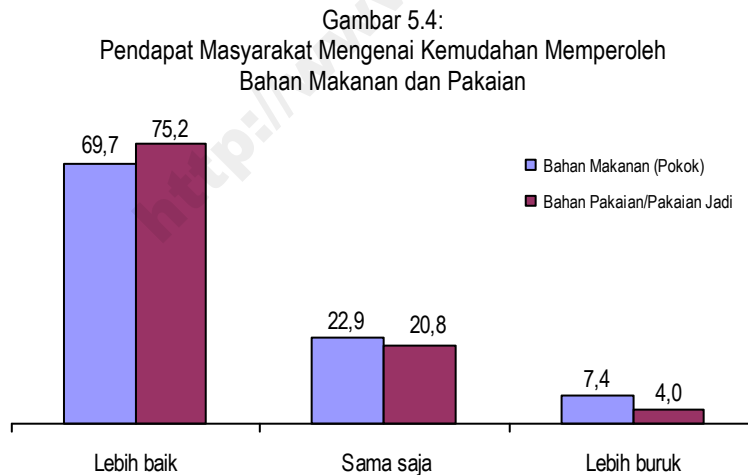
Gambar 5.3:
Pendapat Masyarakat Mengenai Pelayanan Provinsi Pemekaran



5.3. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Pembangunan Perekonomian

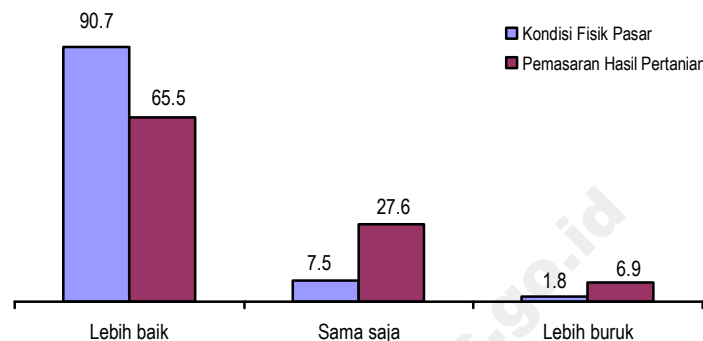
Langkah konkret dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Karenanya pembentukan daerah secara normatif harus mempertimbangkan kemampuan pengembangan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah digali dari potensi daerah yang menggambarkan ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ada empat hal yang digali dari pendapat masyarakat mengenai perkembangan pembangunan perekonomian yaitu: kemudahan memperoleh bahan makanan (pokok), kemudahan memperoleh bahan pakaian atau pakain jadi, kondisi fasilitas fisik bangunan pasar, dan kondisi pemasaran hasil produksi sektor pertanian. Sekitar 69,7 persen masyarakat merasa bahwa pada kondisi sekarang ini kemudahan memperoleh bahan makanan (pokok) lebih baik dibanding sebelum terjadi pemekaran. Hanya sekitar 7,4 persen yang menyatakan lebih buruk, dan selebihnya merasa sama saja. Mengenai kemudahan memperoleh bahan pakaian/pakain jadi, sekitar tiga dari empat masyarakat menyatakan kondisinya lebih baik dibanding sebelum pemekaran. Hanya sekitar 4,0 persen masyarakat yang merasa kondisinya lebih buruk. Gambar 5.4 menyajikan persentase pendapat masyarakat mengenai kemudahan memperoleh bahan makanan (pokok) dan kemudahan memperoleh bahan pakaian/pakaian jadi.



Mengenai kondisi fasilitas fisik bangunan pasar, sekitar 90,7 persen masyarakat menyatakan kondisinya lebih baik dibanding sebelum pemekaran. Sekitar 7,5 persen menyatakan sama saja, dan 1,8 persen merasa kondisinya lebih buruk. Demikian pula untuk kondisi pemasaran hasil produksi sektor pertanian sebanyak 65,5 persen masyarakat menyatakan kondisinya lebih baik, 27,6 persen menyatakan sama saja dan 4,0 persen menyatakan kondisi lebih buruk. Pasar sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli merupakan potensi perokominan daerah yang patut mendapatkan perhatian.

Gambar 5.5:
Pendapat Masyarakat Mengenai Kondisi Fisik Bangunan Pasar
dan Pemasaran Hasil Pertanian



Pendapat masyarakat melalui empat hal di atas merupakan cerminan subyektif sebagian besar masyarakat yang telah merasakan adanya perkembangan pembangunan sarana perokomian. Kondisi perbaikan sarana perekonomian merupakan prasyarat untuk mempercepat perbaikan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya diharapkan tujuan pemekaran wilayah untuk mensejahterakan masyarakat segera tercapai.

5.4. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Pengelolaan Potensi Daerah dan Sarana Sosial Budaya

Potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat^{5.5}. Sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan

^{5.5} Pasal 5 Undang-undang Nomor 129 Tahun 2000

budaya masyarakat^{5.6}. Untuk mengetahui percepatan pengelolaan potensi daerah dan sosial budaya dapat diketahui dari perkembangan kondisi sarana dan prasarana pada kedua bidang tersebut.

Tabel 5.1: Pendapat Masyarakat Mengenai Perkembangan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya

Jenis Sarana dan Prasarana	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk
(1)	(2)	(3)	(4)
Transportasi dan komunikasi	93,0	6,0	1,0
Sarana dan prasarana jalan	88,9	9,7	1,4
Penerangan jalan	80,3	17,4	2,3
Sarana dan prasarana pendidikan	90,7	8,5	0,8
Sarana dan prasarana kesehatan	76,1	21,3	2,6
Sarana dan prasarana olah raga	62,5	35,4	2,1
Tempat hiburan alam, budaya dan lainnya	61,1	31,9	7,0

Tabel 5.1 menyajikan pendapat masyarakat mengenai perkembangan kondisi sarana dan prasarana sosial budaya. Berdasarkan pendapat masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan kondisi sarana dan prasarana sosial budaya telah lebih baik dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Perbaikan pada sarana transportasi dan komunikasi paling banyak dirasakan oleh masyarakat, 93,0 persen merasa lebih baik dan 6,0 persen merasa sama saja. Sehingga hanya 1,0 persen masyarakat yang menyatakan kondisi transportasi dan komunikasi lebih buruk. Perbaikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga dirasakan telah lebih baik, 90,7 persen masyarakat menyatakan hal tersebut.

Secara umum berdasarkan pendapat masyarakat seperti yang tersaji dalam Tabel 5.1, bahwa kinerja pemerintah hasil pemekaran dalam pengelolaan potensi daerah dan sarana sosial budaya telah lebih baik dibandingkan sebelum pemekaran. Meskipun belum semua masyarakat sepakat akan penilaian tersebut, namun kecilnya angka persentase masyarakat yang menyatakan lebih buruk merupakan indikasi pemerintah hasil pemekaran telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan sarana sosial budaya.

^{5.6} Pasal 6 Undang-undang Nomor 129 Tahun 2000

5.5. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Keamanan

Unsur lain yang penting dalam upaya terselenggaranya otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah keamanan dan ketertiban. Sianturi (1985) mengungkapkan tidak mungkin masyarakat dikatakan sejahtera apabila di dalam kehidupan sehari-hari selalu diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan akan kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta maupun kehormatan yang kesemuanya itu merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (h.149). Perasaan aman itu sendiri mempunyai pengertian suatu perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun phsykis atau perasaan bebas dari rasa kekhawatiran atau perasaan bebas dari segala risiko dan adanya perasaan damai secara lahiriah dan batiniah (Zainal, 1985)

Kotak 5.2 Tingkat Keamanan di Madura

Tingkat keamanan salah satunya tercermin dari banyaknya kasus tindak kejahatan yang dilaporkan/tercatat di kepolisian. Dari data yang dihimpun dari masing-masing Polres di Madura, tercatat banyaknya tindak kejahatan yang tercatat selama tahun 2007 adalah seperti yang tersaji pada Tabel A3.

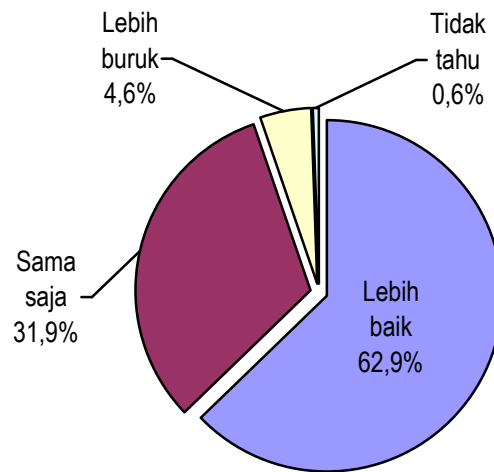
Tabel A3: Jumlah Penduduk dan Banyaknya Tindak Kejahatan di Madura, 2007

Kabupaten	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Banyaknya Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Bangkalan	940.331	285
Sampang	885.379	362
Pamekasan	818.604	391
Sumenep	1.016.471	388

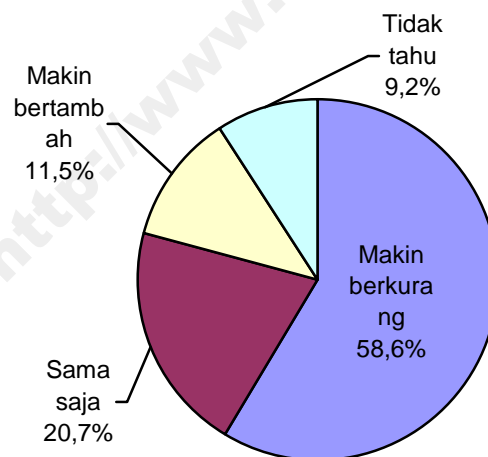
Dengan perkiraan jumlah penduduk seperti tertera pada Tabel A3, maka *crime rate* untuk masing-masing kabupaten dari Bangkalan sampai Sumenep untuk setiap 100.000 penduduk adalah 30,3; 40,9; 47,8 dan 38,2. Angka ini lebih rendah (lebih aman) dibandingkan dengan Jawa Timur secara keseluruhan. Menurut data Mabes Polri *crime rate* Jawa Timur mencapai 116.

Kondisi keamanan yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat adalah kondisi keamanan lingkungan. Sekitar 62,9 persen masyarakat merasakan kondisi keamanan lingkungan saat ini lebih baik dibanding sebelum mengalami pemekaran (Gambar 5.6). Kondisi keamanan ini juga tercermin dari makin berkurangnya kejadian konflik di masyarakat. Sekitar 58,6 persen masyarakat menyatakan kejadian konflik makin berkurang (Gambar 5.7).

Gambar 5.6:
Pendapat Masyarakat Mengenai Kondisi Keamanan Lingkungan



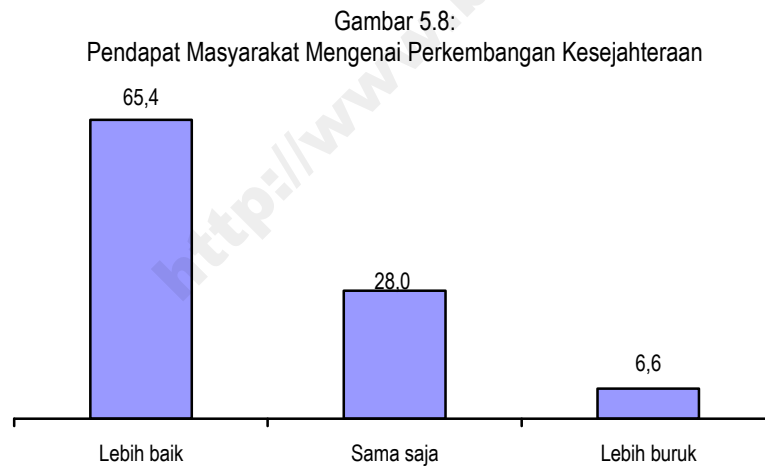
Gambar 5.7:
Pendapat Masyarakat Mengenai Kejadian Konflik



5.6. Pendapat Masyarakat tentang Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 menegaskan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan dilakukan oleh pemerintahan pemekaran dengan harapan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya yang diamanatkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 adalah melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Gambar 5.8 menyajikan persentase masyarakat berdasarkan pendapatnya mengenai perkembangan kesejahteraan rakyat. Gambar tersebut mengungkapkan sebanyak 65,4 persen masyarakat sependapat bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat lebih baik dibandingkan sebelum mengalami pemekaran. Terlepas dari permasalahan pemicu terjadinya pemekaran wilayah yang pada umumnya lebih bernuansa politik dibanding keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, angka 65,4 persen merupakan cerminan bahwa masyarakat telah merasakan adanya perubahan kesejahteraan ke arah yang lebih baik.



<http://www.bps.go.id>

BAB 6

PENUTUP

<http://www.bps.go.id>

6.1. Kesimpulan

1. Syarat pembentukan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis mengharuskan suatu daerah baru yang terbentuk telah memenuhi kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
2. Sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde lama dan orde baru dianggap melahirkan ketimpangan antara pembangunan pusat dan daerah, terutama daerah yang jauh dari jangkauan pusat. Kondisi ini melahirkan semangat desentralisasi yang diawali dengan diundangkannya UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian disusul dengan UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2000 diundangkan perubahan UUD 1945 hasil amandemen kedua, salah satunya terkait dengan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004 diundangkan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggantikan UU no 22 tahun 1999. Di era reformasi terbentuk tujuh provinsi baru yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.
3. Pembentukan dan pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian, sosial dan pelayanan. Peningkatan

perekonomian yang mencerminkan hasil kegiatan usaha perekonomian, salah satunya diukur menggunakan PDRB. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan PDRB di semua provinsi baru cenderung mengalami peningkatan sejak awal periode. Di bidang sosial, peningkatan pembangunan sosial dilihat dari pembangunan pendidikan yang diwujudkan dengan meningkatnya tingkat melek huruf di semua wilayah provinsi, meningkatnya jumlah anak yang bersekolah, dan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk. Di bidang kesehatan, tercermin dari meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Pembangunan sarana dan prasarana ditunjukkan dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah PNS

4. Berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat, sekitar 92,5 persen masyarakat di provinsi penelitian setuju bahwa pembentukan daerah mutlak diperlukan. Sebagian besar masyarakat (62,2 persen) beralasan karena merasa kurang adanya kegiatan pembangunan.
5. Pendapat masyarakat tentang pelayanan masyarakat, sekitar 66,0 persen masyarakat di provinsi penelitian menyatakan pelayanan pemerintah secara umum kepada masyarakat, lebih baik. Salah satunya: pada pelayanan kesehatan, sekitar 76,1 persen masyarakat mengungkapkan bahwa kondisi pelayanan kesehatan lebih baik.
6. Pendapat masyarakat mengenai perkembangan pembangunan perekonomian, sekitar 69,7 persen masyarakat merasa bahwa kemudahan memperoleh bahan makanan (pokok) lebih baik dibanding sebelum terjadi pemekaran. Sekitar tiga dari empat masyarakat menyatakan mengenai kemudahan memperoleh bahan pakaian/pakaian jadi kondisinya lebih baik dibanding sebelum pemekaran. Mengenai kondisi fasilitas fisik bangunan pasar, sekitar 90,7 persen masyarakat menyatakan kondisinya lebih baik dibanding sebelum pemekaran.
7. Pendapat masyarakat tentang perkembangan pengelolaan potensi daerah dan sarana sosial budaya yang ditinjau dari perkembangan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, sarana dan prasarana jalan, penerangan jalan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana olah raga, dan tempat hiburan alam, budaya dan lainnya, sebagian besar masyarakat menyatakan lebih baik dengan rentang persentase antara 61,1 – 93,0 persen.

8. Pendapat masyarakat tentang perkembangan keamanan, sekitar 62,9 persen masyarakat merasakan kondisi keamanan lingkungan saat ini lebih baik dibanding sebelum mengalami pemekaran.
9. Pendapat masyarakat tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat, sebanyak 65,4 persen masyarakat menyatakan kondisi kesejahteraan masyarakat lebih baik dibandingkan sebelum mengalami pemekaran.

6.2. Saran

1. Institusi-institusi terkait yang memberikan persetujuan pembentukan daerah pemerintahan baru hendaknya lebih mempertimbangkan aspek kemampuan daerah pemekaran untuk dapat memenuhi tujuan pembentukan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah pusat melalui instansi terkait, hendaknya melakukan pemantauan melalui indikator-indikator terukur terhadap keberlangsungan pemerintahan hasil pemekaran daerah. Terutama dalam mengarahkan tujuan pemekaran daerah agar sesuai dengan amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<http://www.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Argama, Rizky. 2005. Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1999. Statistik Indonesia Tahun 1999. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2000. Statistik Indonesia Tahun 2000. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2001. Statistik Indonesia Tahun 2001. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2002. Statistik Indonesia Tahun 2002. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2003. Statistik Indonesia Tahun 2003. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2004. Statistik Indonesia Tahun 2004. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2005. Statistik Indonesia Tahun 2005. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2006. Statistik Indonesia Tahun 2006. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2002. Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2002. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2004. Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2004. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007. Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2008. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2001. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000. Seri L2.2. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2001. Penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000. Jakarta
- BPS, Bappenas, UNDP. 2004. Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2004. Jakarta.
- Chalid, Pheni. 2005, otonomi daerah: masalah, pemberdayaan, dan konflik. Cetakan Pertama, Kemitraan, Jakarta.
- Effendy, Arif Roesman. Summary Report: Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota. Usaid, DRSP. Jakarta.

Kemitraan, Yappika. 2006. Beberapa Temuan dan Rekomendasi Penelitian: Program untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi yang membuka ruang partisipasi politik rakyat, efektifitas tata-pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Jakarta.

Latif, Yudi, 2004. Masa Depan Papua Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi. Vol. 1 Nomor 2, Desember 2004. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Percik. 2007. Proses dan implikasi Sosial-politik pemekaran: Studi kasus di sambas dan buton, Dari Percik (The Institute for Social Research, Democracy, and Social Justice) untuk USAID Democratic Reform Support Program (DRSP) dan Decentralization Support Facility (DSF), December 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1980. 30 Tahun Indonesia Merdeka, cetakan ketiga, Tira Pustaka, Jakarta.

Suwondo, MS, Drs. 2000. Desentralisasi Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi non Pemerintah. Malang.

Subono, Nur Iman. 2007. Desentralisasi, Investasi Publik dan Dinamika Politik: Belajar dari kasus Bolivia. Paper dalam konferensi dengan tema, "Beyond Poverty Reduction: Promoting a Comprehensive Social Policy Framework for Decentralized Indonesia", Jakarta, 27-28 Juni 2007, Jakarta.

Sianturi, L.M. 1998. Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kumpulan bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik.

Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cetakan ke IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Stalker, Peter. 2007. Kita Suarakan MDG's Demi Pencapaiannya di Indonesia. Bappenas, Cetakan Pertama, United Nations.

Taufiq C Dawood. 2007, Policy Paper: Pemekaran Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Anggaran Untuk Pelayanan Publik. Sekretariat Aceh Recovery Forum.

Tim Penyusunan Laporan Tujuan Pembangunan Millennium (MDG's) Indonesia. 2007. Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goal's Indonesia 2007. Bappenas, Cetakan Pertama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

UNDP. 2006. Lebih dari sekedar kelangkaan: kekuasaan, kemiskinan dan krisis air di tingkat global. Laporan pembangunan manusia 2006, United Nations Development Programme (UNDP).

Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2004. Desentralisasi dalam tata pemerintahan kolonial Hindia-Belanda: kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia [1900-1940], Bayu Media, Malang.

Zainal, 1998. Indikator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kamtibmas. Kumpulan bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik.

<http://www.bps.go.id>

Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>

<http://www.datastatistik-indonesia.com>

<http://www.bappenas.go.id>

<http://www.drsp-usaid.org>

<http://www.undp.org>

<http://www.undp.or.id>

<http://www.dsfindonesia.org>

<http://www.targetmdgs.org>

<http://www.abc.net.au>

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.legalitas.org>

<http://www.kemitraan.or.id>

<http://www.percik.or.id>

<http://www.suramadu.com>

<http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2008/11/11/brk,20081111-145212,id.html>

<http://www.bps.go.id>

TABEL-TABEL LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di 5 Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 2001 – 2005 (Juta rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Induk						
1	Sumatera Selatan	42.048.614	43.643.276	45.247.401	47.344.395	49.634.518
2	Riau	95.442.416	96.872.503	73.077.959	75.216.719	79.283.587
3	Jawa Barat	203.369.000	211.391.703	221.628.174	233.057.691	245.798.062
4	Sulawesi Utara	10.996.587	11.291.463	11.652.793	12.149.501	12.744.550
5	Sulawesi Selatan	32.334.905	33.645.383	35.410.566	37.291.394	36.424.018
Provinsi Pemekaran						
1	Kep. Bangka Belitung	6.103.270	6.904.687	7.719.713	7.966.849	8.225.704
2	Kepulauan Riau			26.775.786	28.509.063	30.381.500
3	Banten	46.959.318	49.449.321	51.957.458	54.880.407	58.106.948
4	Gorontalo	1.554.100	1.655.328	1.769.188	1.891.763	2.025.321
5	Sulawesi Barat					3.120.765

2 PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 di 5 Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 2001 – 2005 (Juta rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Induk						
1	Sumatera Selatan	28.804.126	30.083.324	31.810.725	33.969.083	36.318.656
2	Riau	45.845.657	49.539.638	28.326.774	30.879.768	33.512.542
3	Jawa Barat	184.304.149	201.421.740	211.747.822	223.349.892	236.925.108
4	Sulawesi Utara	10.543.193	11.273.402	11.631.389	12.127.463	12.725.590
5	Sulawesi Selatan	32.199.320	33.569.971	35.333.533	37.211.934	36.339.481
Provinsi Pemekaran						
1	Kep. Bangka Belitung	6.103.270	6.904.687	7.253.850	7.566.617	7.907.428
2	Kepulauan Riau			24.829.131	26.671.125	28.579.848
3	Banten	46.959.318	49.449.321	51.957.458	54.880.407	58.106.948
4	Gorontalo	1.554.100	1.655.328	1.769.188	1.891.763	2.025.321
5	Sulawesi Barat					3.120.765

3 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 di 5 Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 2001 – 2005 (Juta rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Induk						
1	Sumatera Selatan	5.955.255	6.040.053	6.938.089	7.142.641	7.318.201
2	Riau	18.492.990	17.996.745	16.502.449	16.642.318	17.313.779
3	Jawa Barat	5.581.721	5.689.180	5.811.222	6.036.063	6.308.104
4	Sulawesi Utara	5.426.287	5.501.670	5.456.654	5.628.425	5.986.786
5	Sulawesi Selatan	3.959.251	4.061.474	4.290.796	4.455.838	4.850.260
Provinsi Pemekaran						
1	Kep. Bangka Belitung	6.719.383	7.532.547	7.814.052	7.781.700	7.883.135
2	Kepulauan Riau			22.925.299	23.916.096	23.831.469
3	Banten	5.620.701	5.737.506	5.773.483	6.011.802	6.435.722
4	Gorontalo	1.836.151	1.926.115	1.998.814	2.108.284	2.196.242
5	Sulawesi Barat					3.219.179

4 PDRB Per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 di 5 Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 2001 – 2005 (Juta rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Induk						
1	Sumatera Selatan	4.079.467	4.163.410	4.877.753	5.124.766	5.354.887
2	Riau	8.883.281	9.203.357	6.396.746	6.832.403	7.318.397
3	Jawa Barat	5.058.462	5.420.859	5.552.153	5.784.637	6.080.391
4	Sulawesi Utara	5.202.558	5.492.870	5.446.631	5.618.215	5.977.879
5	Sulawesi Selatan	3.942.649	4.052.371	4.281.462	4.446.344	4.839.003
Provinsi Pemekaran						
1	Kep. Bangka Belitung	6.719.383	7.532.547	7.342.496	7.390.769	7.578.114
2	Kepulauan Riau			21.258.582	22.374.260	22.418.240
3	Banten	5.620.701	5.737.506	5.773.483	6.011.802	6.435.722
4	Gorontalo	1.836.151	1.926.115	1.998.814	2.108.284	2.196.242
5	Sulawesi Barat					3.219.179

5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di 5 Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 2001 – 2005 (Persen)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Induk						
1	Sumatera Selatan	1,77	3,08	3,68	4,63	4,84
2	Riau	0,72	2,64	3,08	2,93	5,41
3	Jawa Barat	3,89	3,94	4,84	5,16	5,47
4	Sulawesi Utara	4,09	3,32	3,20	4,26	4,90
5	Sulawesi Selatan	5,11	4,09	5,25	5,31	6,04
Provinsi Pemekaran						
1	Kep. Bangka Belitung	5,95	6,85	11,80	3,20	3,25
2	Kepulauan Riau				6,47	6,57
3	Banten	3,64	4,11	5,07	5,63	5,88
4	Gorontalo	5,49	6,45	6,88	6,93	7,06
5	Sulawesi Barat					

6 Laju Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 di 5 Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 2001 – 2005 (Persen)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Induk						
1	Sumatera Selatan	2,93	4,44	5,74	6,79	6,92
2	Riau	7,20	7,63	7,30	9,01	8,53
3	Jawa Barat	4,93	4,22	5,13	5,48	6,08
4	Sulawesi Utara	4,27	3,25	3,18	4,26	4,93
5	Sulawesi Selatan	5,10	4,09	5,25	5,32	6,04
Provinsi Pemekaran						
1	Kep. Bangka Belitung	5,95	6,85	5,06	4,31	4,50
2	Kepulauan Riau				4,42	7,16
3	Banten	3,64	4,11	5,07	5,63	5,88
4	Gorontalo	5,49	6,45	6,88	6,93	7,06
5	Sulawesi Barat					

7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di lima Provinsi Induk dan Provinsi Pemekarannya Tahun 1996 – 2005 (Juta rupiah)

No	Provinsi	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Provinsi Induk											
1	Sumatera Selatan	16.986.104	20.156.022	33.071.513	36.036.445	45.668.901	47.100.349	49.500.159	55.938.675	64.319.375	81.532.287
2	Riau	23.854.824	26.865.154	42.838.291	48.559.254	55.429.837	107.293.094	116.151.206	97.275.278	114.246.374	139.008.996
3	Jawa Barat	89.405.209	101.100.563	142.763.786	159.349.580	181.629.901	219.186.969	241.644.120	273.177.014	301.012.077	387.353.143
4	Sulawesi Utara	479.736	5.614.149	9.449.108	10.781.228	11.761.791	11.856.612	12.694.715	13.744.658	15.327.577	17.815.123
5	Sulawesi Selatan	11.833.098	13.538.002	21.950.764	24.064.893	26.596.247	34.770.983	38.511.168	42.843.280	48.614.179	52.042.724
Provinsi Pemekaran											
1	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	6.576.424	8.158.333	9.571.743	11.080.753	13.387.737
2	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	32.845.566	36.736.621	40.984.738
3	Banten	-	-	-	-	-	51.970.381	60.612.554	66.575.297	73.713.784	84.622.288
4	Gorontalo	-	-	-	-	-	1.821.856	2.148.436	2.479.720	2.801.544	3.386.866
5	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.422.946

[illegible]

9 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Pemekaran Provinsi

Provinsi	Setuju	Tidak Setuju	Tidak tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	85.0	1.5	13.5	100.0
Kepulauan Riau	93.5	2.0	4.5	100.0
Banten	92.0	2.0	6.0	100.0
Gorontalo	95.5	1.0	3.5	100.0
Sulawesi Barat	96.5	0.5	3.0	100.0
Total	92.5	1.4	6.1	100.0

10 Persentase Penduduk yang Menyetujui Pemekaran Provinsi menurut Alasan Utama Diperlukan Pemekaran Provinsi

Provinsi	Karena kurang adanya kegiatan pembangunan	Akses ke Ibukota provinsi lama, sulit	Karakteristik pddk dll dari daerah baru spesifik	daerah baru sudah ada jauh sblm Indonesia merdeka	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	72.4	11.8	-	0.6	15.3	100.0
Kepulauan Riau	56.7	10.7	2.1	-	30.5	100.0
Banten	57.6	9.2	2.7	0.5	29.9	100.0
Gorontalo	63.9	12.6	8.4	1.0	14.1	100.0
Sulawesi Barat	61.1	16.6	4.1	1.0	17.1	100.0
Total	62.2	12.2	3.6	0.6	21.4	100.0

11 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Kondisi Pelayanan Kesehatan

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	84.0	13.5	2.5	100.0
Kepulauan Riau	71.0	23.5	5.5	100.0
Banten	74.0	24.5	1.5	100.0
Gorontalo	92.0	5.5	2.5	100.0
Sulawesi Barat	59.5	39.5	1.0	100.0
Total	76.1	21.3	2.6	100.0

<http://www.bps.go.id>

12 Persentase Penduduk menurut Persepsi Keadaan Memperoleh Bahan Makanan/ Makanan Pokok

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	79.5	16.5	4.0	100.0
Kepulauan Riau	56.5	28.0	15.5	100.0
Banten	51.5	40.5	8.0	100.0
Gorontalo	94.0	4.5	1.5	100.0
Sulawesi Barat	67.0	25.0	8.0	100.0
Total	69.7	22.9	7.4	100.0

<http://www.bps.go.id>

13 Persentase Penduduk menurut Persepsi Keadaan Memperoleh Bahan Pakaian atau Pakaian Jadi

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	82.0	15.5	2.5	100.0
Kepulauan Riau	61.0	31.5	7.5	100.0
Banten	66.5	30.0	3.5	100.0
Gorontalo	93.5	5.0	1.5	100.0
Sulawesi Barat	73.0	22.0	5.0	100.0
Total	75.2	20.8	4.0	100.0

<http://www.bps.go.id>

14 Persentase Penduduk menurut Persepsi Keadaan Fasilitas Fisik Bangunan Pasar

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	90.5	9.0	0.5	100.0
Kepulauan Riau	88.0	10.0	2.0	100.0
Banten	88.5	10.5	1.0	100.0
Gorontalo	92.5	5.5	2.0	100.0
Sulawesi Barat	94.0	2.5	3.5	100.0
Total	90.7	7.5	1.8	100.0

<http://www.bps.go.id>

15 Persentase Penduduk menurut Persepsi Kondisi Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	65.0	23.5	11.5	100.0
Kepulauan Riau	59.5	30.5	10.0	100.0
Banten	45.5	47.0	7.5	100.0
Gorontalo	94.5	4.0	1.5	100.0
Sulawesi Barat	63.0	33.0	4.0	100.0
Total	65.5	27.6	6.9	100.0

16 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Kondisi Pelayanan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	61.5	32.0	6.5	100.0
Kepulauan Riau	58.0	32.0	10.0	100.0
Banten	52.5	44.0	3.5	100.0
Gorontalo	91.5	8.0	0.5	100.0
Sulawesi Barat	66.5	30.0	3.5	100.0
Total	66.0	29.2	4.8	100.0

<http://www.bps.go.id>

17 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Akses Transportasi dan Komunikasi

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	93.5	5.5	1.0	100.0
Kepulauan Riau	91.5	6.5	2.0	100.0
Banten	92.5	7.0	0.5	100.0
Gorontalo	96.0	4.0	-	100.0
Sulawesi Barat	91.5	7.0	1.5	100.0
Total	93.0	6.0	1.0	100.0

18 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Keadaan Sarana dan Prasarana Jalan

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	84.0	14.0	2.0	100.0
Kepulauan Riau	92.0	5.0	3.0	100.0
Banten	85.0	14.5	0.5	100.0
Gorontalo	96.0	3.5	0.5	100.0
Sulawesi Barat	87.5	11.5	1.0	100.0
Total	88.9	9.7	1.4	100.0

<http://www.bps.go.id>

19 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Keadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	64.8	30.2	5.0	100.0
Kepulauan Riau	73.5	20.0	6.5	100.0
Banten	83.0	17.0	-	100.0
Gorontalo	96.5	3.5	-	100.0
Sulawesi Barat	83.5	16.5	-	100.0
Total	80.3	17.4	2.3	100.0

<http://www.bps.go.id>

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	92.0	6.0	2.0	100.0
Kepulauan Riau	88.5	11.5		100.0
Banten	84.0	15.0	1.0	100.0
Gorontalo	96.5	3.5		100.0
Sulawesi Barat	92.5	6.5	1.0	100.0
Total	90.7	8.5	0.8	100.0

<http://www.bps.go.id>

21 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Provinsi	Lebih banyak	Sama saja	Lebih sedikit	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	93.5	5.5	1.0	100.0
Kepulauan Riau	82.5	16.0	1.5	100.0
Banten	82.0	17.0	1.0	100.0
Gorontalo	95.5	4.0	0.5	100.0
Sulawesi Barat	71.0	27.0	2.0	100.0
Total	84.9	13.9	1.2	100.0

22 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga

Provinsi	Lebih banyak	Sama saja	Lebih sedikit	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	73.0	25.0	2.0	100.0
Kepulauan Riau	38.5	56.5	5.0	100.0
Banten	42.0	56.5	1.5	100.0
Gorontalo	89.5	10.0	0.5	100.0
Sulawesi Barat	69.5	29.0	1.5	100.0
Total	62.5	35.4	2.1	100.0

<http://www.bps.go.id>

23 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Perkembangan Tempat Hiburan Alam, Budaya yang Dipugar untuk Tujuan Komersil

Provinsi	Lebih banyak	Sama saja	Lebih sedikit	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	56.6	41.9	1.5	100.0
Kepulauan Riau	41.0	29.5	29.5	100.0
Banten	48.0	49.5	2.5	100.0
Gorontalo	86.5	12.0	1.5	100.0
Sulawesi Barat	73.5	26.5	-	100.0
Total	61.1	31.9	7.0	100.0

<http://www.bps.go.id>

24 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Situasi Keamanan di Lingkungan Tempat Tinggal

Provinsi	Lebih aman	Sama aman	Tidak aman	Tidak tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	69.5	22.5	8.0	-	100.0
Kepulauan Riau	57.8	36.7	5.5	-	100.0
Banten	57.5	36.5	6.0	-	100.0
Gorontalo	76.9	19.6	2.0	1.5	100.0
Sulawesi Barat	53.0	44.0	1.5	1.5	100.0
Total	62.9	31.9	4.6	0.6	100.0

<http://www.bps.go.id>

25 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Perkembangan Kejadian Konflik

Provinsi	Makin berkurang	Sama saja	Makin bertambah	Tidak tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Kep. Bangka Belitung	64.7	5.9	29.4	-	100.0
Kepulauan Riau	26.3	47.4	15.8	10.5	100.0
Banten	50.0	50.0	-	-	100.0
Gorontalo	-	40.0	-	60.0	100.0
Sulawesi Barat	81.6	5.3	5.3	7.9	100.0
Total	58.6	20.7	11.5	9.2	100.0

26 Persentase Penduduk menurut Persepsi Mengenai Peningkatan Kesejahteraan dari Masyarakat Secara Keseluruhan

Provinsi	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	65.0	26.5	8.5	100.0
Kepulauan Riau	49.5	37.0	13.5	100.0
Banten	52.5	38.5	9.0	100.0
Gorontalo	89.0	10.5	0.5	100.0
Sulawesi Barat	71.0	27.5	1.5	100.0
Total	65.4	28.0	6.6	100.0

<http://www.bps.go.id>